

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Partisipasi aktif masyarakat merupakan salah satu fondasi utama dalam membangun demokrasi yang substansial di Indonesia. Partisipasi politik tidak hanya menjadi indikator keberhasilan proses demokratisasi, tetapi juga merefleksikan tingkat kesadaran politik masyarakat dalam mengawal dan memajukan sistem politik yang inklusif dan partisipatoris (Verba, Schlozman, & Brady, 1995, hlm. 271). Partisipasi masyarakat dalam politik dapat diwujudkan melalui berbagai aktivitas, seperti bergabung dengan partai politik, terlibat dalam lembaga swadaya masyarakat (LSM) pemantau pemilu, mendaftar sebagai petugas pelaksana atau pengawas pemilu, serta membentuk atau bergabung dengan organisasi-organisasi kerelawanan yang bergerak di bidang politik (Norris, 2002, hlm. 188).

Partisipasi politik merupakan salah satu faktor paling krusial dalam memperkuat demokrasi substansial. Dalam tataran ideal, masyarakat tidak hanya hadir sebagai pemilih pasif, melainkan turut terlibat aktif dalam berbagai proses politik yang berlangsung, termasuk kampanye dan mobilisasi massa (Pateman, 1970, p. 52). Pada praktiknya, partisipasi politik di Indonesia diwujudkan melalui partai politik serta pemilihan umum (pemilu), yang diatur secara formal oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan

diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Namun, seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya kesadaran publik akan pentingnya kontrol masyarakat terhadap demokrasi, lahirlah fenomena relawan politik yakni individu atau kelompok yang secara sukarela terlibat dalam proses politik tanpa keterikatan struktural dengan partai politik tertentu (Norris, 2020, p. 42; Dalton, 2017, p. 83; Han, 2014, p. 55).

Fenomena relawan politik menandai terjadinya pola kampanye dari cara-cara tradisional yang umumnya didominasi oleh mesin partai menjadi lebih cair, partisipatif, dan berpusat pada inisiatif masyarakat (Tarrow, 2011, p. 125; Putnam, 2000, p. 98). Relawan politik kerap memanfaatkan media sosial dan pendekatan komunitas untuk menjangkau pemilih di lapisan akar rumput (Howard, 2011, p. 33). Dengan demikian, partisipasi politik menjadi semakin dekat dengan warga, di mana kanal digital mampu menjangkau audiens yang luas dalam waktu relatif singkat. Kondisi ini sejalan dengan apa yang disebut Norris (2020, p. 25) sebagai transformasi digital dalam kampanye politik, yang memfasilitasi mobilisasi massa secara daring (*online*) maupun luring (*offline*).

Dalam konteks lokal, Provinsi Sulawesi Selatan merupakan wilayah yang memiliki keragaman latar belakang sosial, budaya, dan politik. Selain pemilu nasional (Pilpres dan Pileg), di tingkat lokal juga diselenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada level provinsi, kabupaten, dan kota (Ufen, 2008, p. 57). Setiap daerah di Sulawesi Selatan memiliki karakteristik tersendiri, yang kerap kali tidak sepenuhnya terjangkau oleh strategi partai

politik berskala nasional. Pada titik inilah peran relawan politik menjadi signifikan, karena mereka hadir langsung di tengah masyarakat setempat, mengenali isu-isu lokal, serta memanfaatkan jejaring sosial yang lebih personal dan kontekstual (Han, 2014, p. 119; Scammell, 2020, p. 69).

Salah satu kota yang memiliki dinamika politik yang menarik adalah Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagai kota metropolitan terbesar di kawasan Indonesia Timur dengan populasi lebih dari 1,4 juta jiwa, Makassar menjadi episentrum politik Sulawesi Selatan (BPS Kota Makassar, 2023, p. 15). Kota ini memiliki karakteristik unik sebagai wilayah urban modern dengan tingkat penetrasi internet dan media sosial yang tinggi, namun di sisi lain tetap mempertahankan struktur politik lokal yang kental dengan nuansa patronase, kekerabatan, serta pengaruh figur-figur elit lokal (Winters, 2011, p. 45). Dalam Pilkada Kota Makassar 2018, tingkat partisipasi pemilih mencapai 76,8%, melampaui rata-rata nasional yang berada di kisaran 73% (KPU Kota Makassar, 2019, p. 4). Peningkatan partisipasi tersebut tidak terlepas dari maraknya komunitas relawan yang bergerak di berbagai kecamatan, memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan platform digital lainnya untuk memobilisasi dukungan politik (Bawaslu Kota Makassar, 2022, p. 6).

Makassar memiliki kondisi sosiokultural yang khas, di mana kuatnya basis kekerabatan, nilai kedaerahan, dan struktur patronase yang masih mengakar (Winters, 2011, p. 45). Figur-figur lokal yang memiliki pengaruh di masyarakat sering kali mampu memobilisasi dukungan melalui jejaring personal yang mereka miliki. Dalam beberapa kasus, komunitas relawan

bahkan dibentuk oleh figur sentral tersebut atau digawangi oleh tokoh-tokoh komunitas, kelompok profesi, hingga organisasi kepemudaan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan penting: sejauh mana relawan politik di Makassar benar-benar lahir dari inisiatif warga secara otonom, atau justru terkooptasi oleh elit tertentu? (Aspinall & Sukmajati, 2016, p. 45). Pada titik inilah penelitian mengenai relawan politik menjadi relevan, karena dapat memetakan apakah relawan berfungsi sebagai sarana peningkatan kualitas demokrasi lokal, atau justru menjadi instrumen strategi politik jangka pendek.

Keunggulan utama relawan politik terletak pada kemampuan mereka menyesuaikan diri dengan konteks lokal. Dalam kerangka teori strategi (Kotler & Keller, 2016, p. 58), relawan dapat bergerak secara fleksibel dan merumuskan narasi kampanye yang lebih dekat dengan kepentingan masyarakat lokal. Mereka tidak dibatasi oleh struktur hierarkis partai, sehingga respons terhadap isu-isu terkini dapat dilakukan secara lebih cepat dan adaptif (Norris, 2020, p. 42; Fuchs, 2021, p. 91). Di Makassar, relawan politik hadir dalam berbagai bentuk: ada yang berbasis komunitas profesi (seperti relawan dokter, guru, pengusaha muda), ada yang berbasis kelompok kepemudaan dan mahasiswa, ada pula yang berbasis territorial di tingkat kelurahan dan kecamatan.

Fenomena relawan politik di Makassar tidak lepas dari persoalan empiris. Laporan Bawaslu Kota Makassar (2022, p. 10) menyebutkan adanya 18 laporan dugaan politik uang yang melibatkan relawan pada Pilkada sebelumnya, di mana relawan diduga menjadi saluran distribusi

sembako atau uang tunai menjelang hari pemungutan suara. Praktik semacam ini menimbulkan keraguan terhadap integritas dan idealisme relawan, terlebih ketika mereka hanya aktif hingga pemilu usai lalu "membubarkan diri" (Aspinall & Sukmajati, 2016, p. 70). Kondisi tersebut mengarah pada persoalan akuntabilitas, yaitu perlunya mekanisme relawan tetap memegang prinsip demokrasi yang bersih dan berkelanjutan pasca-kontestasi elektoral.

Dalam konteks Pilkada Sulawesi Selatan 2024, fenomena relawan politik kembali menjadi sorotan dengan kemunculan berbagai kelompok relawan yang mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Salah satu kelompok relawan yang menarik untuk dikaji adalah Relawan Dozer yang mendukung pasangan Andi Sudirman Sulaiman – Fatmawati Rusdi. Kehadiran Relawan Dozer dalam konstelasi politik Sulawesi Selatan memperlihatkan dinamika baru dalam pola partisipasi politik masyarakat, di mana relawan tidak hanya berfungsi sebagai mesin kampanye, tetapi juga sebagai jembatan antara calon pemimpin dengan aspirasi masyarakat akar rumput. Namun, di balik mobilisasi massa yang terlihat masif, terdapat sejumlah pertanyaan mendasar yang belum terjawab secara memadai dalam literatur.

Pertama, terkait dengan proses pembentukan relawan politik. Sebagian besar studi tentang relawan politik cenderung mengasumsikan bahwa relawan terbentuk secara organik dari kesadaran sipil masyarakat (Han, 2014; Scammell, 2020). Namun, dalam konteks Sulawesi Selatan yang memiliki struktur patronase kuat dan basis kekerabatan yang

mengakar (Winters, 2011), proses pembentukan relawan seringkali jauh lebih kompleks. Belum ada kajian mendalam yang mengungkap bagaimana sebenarnya Relawan Dozer terbentuk: apakah muncul dari inisiatif spontan masyarakat yang terinspirasi oleh visi-misi pasangan Andi Sudirman Sulaiman – Fatmawati Rusdi, atau justru merupakan hasil dari strategi mobilisasi terstruktur yang diinisiasi oleh elit politik atau tim kampanye? Pertanyaan ini penting karena akan menentukan sejauh mana Relawan Dozer dapat dikategorikan sebagai bentuk partisipasi politik yang genuine atau sekadar instrumen elektoral yang dimobilisasi secara top-down. Aspek-aspek seperti latar belakang pendiri, mekanisme rekrutmen anggota, struktur organisasi, sumber pendanaan, serta motivasi awal para relawan untuk bergabung menjadi elemen krusial yang perlu diinvestigasi untuk memahami karakteristik sejati dari Relawan Dozer.

Kedua, terkait dengan relasi antara relawan dan pemilih dalam membentuk partisipasi politik. Literatur tentang relawan politik umumnya berfokus pada strategi mobilisasi massa dan penggunaan media sosial (Norris, 2020; Howard, 2011), namun sangat minim yang mengkaji secara mendalam bagaimana relasi interaksional antara relawan dan pemilih terbentuk dan bagaimana relasi tersebut mempengaruhi keputusan politik pemilih. Dalam konteks Sulawesi Selatan yang kental dengan kultur personal relationship dan patronase (Aspinall & Sukmajati, 2016), relasi antara relawan dan pemilih tidak sekadar transaksional atau berbasis informasi, tetapi juga melibatkan dimensi emosional, kekerabatan, dan kepercayaan personal. Belum ada studi yang secara spesifik mengkaji

bagaimana Relawan Dozer membangun relasi dengan pemilih di lapangan: apakah melalui pendekatan door-to-door, pertemuan komunitas, kampanye digital, atau kombinasi dari berbagai metode? Bagaimana relawan menerjemahkan visi-misi pasangan Andi Sudirman Sulaiman – Fatmawati Rusdi menjadi narasi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari pemilih? Sejauh mana relasi yang terbangun bersifat ideologis (berbasis program dan visi) ataukah pragmatis (berbasis janji material atau keuntungan jangka pendek)? Pemahaman tentang pola relasi ini sangat penting untuk menilai kualitas partisipasi politik yang dihasilkan oleh kerja relawan.

Ketiga, terkait dengan prinsip pertukaran kepentingan (exchange theory) dalam dinamika relawan politik. Teori pertukaran sosial (Blau, 1964; Homans, 1961) menyatakan bahwa hubungan sosial, termasuk partisipasi politik, seringkali didasarkan pada kalkulasi cost-benefit di mana individu terlibat dalam suatu aktivitas dengan harapan mendapatkan imbalan tertentu, baik material maupun non-material. Dalam konteks relawan politik di Indonesia, khususnya di daerah dengan kultur patronase yang kuat seperti Sulawesi Selatan, prinsip pertukaran kepentingan seringkali menjadi motor penggerak partisipasi (Aspinall & Sukmajati, 2016; Winters, 2011). Namun, belum ada studi yang secara eksplisit mengkaji bagaimana prinsip pertukaran kepentingan bekerja dalam konteks Relawan Dozer: apa yang menjadi motivasi relawan untuk terlibat apakah semata-mata idealisme dan kepercayaan terhadap kapasitas kepemimpinan Andi Sudirman Sulaiman – Fatmawati Rusdi, ataukah terdapat ekspektasi terhadap imbalan tertentu seperti akses terhadap jabatan publik, proyek pemerintah, atau keuntungan

ekonomi lainnya di masa depan? Bagaimana relawan menegosiasikan kepentingan mereka dengan kepentingan pasangan calon yang mereka dukung? Apakah terdapat perbedaan pola pertukaran kepentingan antara relawan di tingkat elit (coordinator, ketua) dengan relawan akar rumput? Pemahaman tentang dinamika pertukaran kepentingan ini akan memberikan gambaran realistis tentang motivasi partisipasi politik dan sejauh mana relawan benar-benar bekerja untuk kepentingan publik atau untuk kepentingan pribadi dan kelompok mereka.

Ketiga pertanyaan di atas mengenai proses pembentukan relawan, pola relasi relawan-pemilih, dan dinamika pertukaran kepentingan merupakan kesenjangan mendasar dalam literatur partisipasi politik di Indonesia yang perlu dijawab melalui studi empiris mendalam. Mayoritas studi tentang relawan politik di Indonesia masih bersifat deskriptif dan menggunakan perspektif normatif yang cenderung mengidealisasi peran relawan sebagai agen demokratisasi (Mietzner, 2013; Tomsa, 2014). Padahal, realitas di lapangan jauh lebih kompleks dan seringkali menunjukkan ambiguitas antara idealisme dan pragmatisme, antara partisipasi genuine dan mobilisasi terstruktur, serta antara kepentingan publik dan kepentingan privat.

Studi tentang Relawan Dozer dalam Pilkada Sulawesi Selatan 2024 menjadi penting karena beberapa alasan. Pertama, Pilkada 2024 merupakan kontestasi terkini yang memungkinkan peneliti untuk mengamati fenomena secara real-time dan mendapatkan data yang lebih segar dan akurat. Kedua, pasangan Andi Sudirman Sulaiman – Fatmawati

Rusdi memiliki latar belakang yang menarik untuk dikaji, terutama dalam hal bagaimana mereka membangun basis dukungan di tengah kompetisi politik yang ketat. Ketiga, Relawan Dozer sebagai kelompok pendukung memiliki karakteristik yang perlu dieksplorasi lebih lanjut, terutama dalam hal struktur organisasi, strategi mobilisasi, dan pola interaksi dengan pemilih. Keempat, konteks Sulawesi Selatan dengan kultur politik lokalnya yang khas memberikan setting yang ideal untuk menguji teori-teori partisipasi politik dan pertukaran sosial yang selama ini lebih banyak dikembangkan berdasarkan studi di negara-negara Barat atau bahkan di Jawa.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan literatur tersebut dengan mengkaji secara mendalam fenomena Relawan Dozer dalam Pilkada Sulawesi Selatan 2024. Penelitian ini tidak hanya akan memberikan deskripsi tentang aktivitas relawan, tetapi juga akan menganalisis secara kritis dinamika struktural, relasional, dan transaksional yang membentuk partisipasi politik melalui mekanisme kerelawanan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan memanfaatkan kerangka teori pertukaran serta teori partisipasi politik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan kritis tentang peran relawan politik dalam demokrasi lokal Indonesia.

B. Konteks Penelitian

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2024 berlangsung dalam suasana kontestasi politik yang dinamis dan kompetitif. Sebagai salah satu provinsi dengan jumlah pemilih terbesar di

kawasan timur Indonesia mencapai 6.680.807 pemilih aktif Sulawesi Selatan menjadi arena pertarungan strategis bagi para kandidat yang berlomba merebut simpati publik. Pilkada kali ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi elektoral semata, tetapi juga cerminan dari pergeseran pola kampanye politik yang semakin mengandalkan peran relawan sebagai garda terdepan dalam mobilisasi dukungan di tingkat akar rumput.

Persaingan dalam Pilkada Gubernur Sulawesi Selatan 2024 berlangsung ketat, dengan hadirnya beberapa pasangan calon yang memiliki basis dukungan kuat, baik dari partai politik maupun tokoh-tokoh lokal berpengaruh. Pasangan Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi tampil sebagai salah satu kontestan yang mengusung narasi perubahan dan pembangunan berkelanjutan. Menghadapi kompetitor-kompetitor tangguh yang didukung mesin partai besar dan jaringan patronase lama, pasangan ini menempuh strategi kampanye berbasis komunitas dengan mengoptimalkan peran Relawan Dozer sebagai penggerak utama di lapangan. Relawan Dozer hadir sebagai kekuatan sipil yang bekerja secara mandiri, memanfaatkan pendekatan personal, media sosial, dan aktivitas dari pintu ke pintu untuk menjangkau pemilih hingga ke pelosok daerah.

Pilkada 2024 diwarnai oleh dinamika politik identitas, isu-isu lokal seperti pembangunan infrastruktur, kesejahteraan petani dan nelayan, serta tuntutan transparansi pemerintahan. Kampanye berlangsung di tengah era digital yang memungkinkan narasi politik menyebar cepat melalui platform media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan

WhatsApp. Mobilisasi massa tidak lagi sepenuhnya bergantung pada aparat partai, melainkan ditopang oleh gerakan relawan yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap kondisi lokal. Namun, di balik semangat partisipasi tersebut, masih ditemukan praktik-praktik politik uang, patronase, dan kooptasi elite yang mengancam integritas proses demokrasi.

Dalam konteks Kota Makassar sebagai ibu kota provinsi dan pusat konsentrasi pemilih terbesar budaya memilih masyarakat menunjukkan karakteristik yang unik. Pemilih Makassar cenderung lebih kritis dan rasional dibandingkan daerah-daerah lain di Sulawesi Selatan, terutama kalangan pemilih muda dan kelas menengah perkotaan yang lebih terpapar informasi politik melalui media digital. Namun demikian, struktur sosial berbasis kekerabatan, kedekatan dengan tokoh lokal, serta jaringan patronase masih memainkan peran penting dalam menentukan preferensi politik. Masyarakat Makassar juga dikenal memiliki ikatan emosional yang kuat terhadap figur-figur yang dianggap merepresentasikan nilai-nilai lokal dan mampu memberikan manfaat langsung bagi kehidupan mereka.

Pemilih Makassar cenderung pragmatis, tidak hanya melihat latar belakang partai pengusung, tetapi juga rekam jejak, visi-misi, dan kemampuan calon dalam menjawab persoalan konkret seperti lapangan kerja, pendidikan, dan pelayanan publik. Oleh karena itu, strategi kampanye yang efektif harus mampu menggabungkan pendekatan emosional berbasis budaya lokal dengan argumen rasional yang menyentuh kebutuhan nyata masyarakat. Dalam konteks inilah Relawan Dozer beroperasi: mereka berfungsi sebagai jembatan antara kandidat dengan

pemilih, menerjemahkan visi politik ke dalam bahasa dan narasi yang mudah dipahami serta relevan dengan kehidupan sehari-hari warga.

Pilkada Sulawesi Selatan 2024 juga berlangsung dalam situasi pascapandemi COVID-19, masyarakat mulai pulih dari tekanan ekonomi dan social dan tetap menuntut kepemimpinan yang tanggap terhadap kebutuhan pemulihan. Isu kesehatan, ketahanan pangan, dan pemulihan ekonomi lokal menjadi prioritas dalam wacana kampanye. Relawan politik, termasuk Relawan Dozer, tidak hanya bertugas menyebarkan narasi politik, tetapi juga terlibat dalam program-program sosial konkret yang memperlihatkan komitmen pasangan calon terhadap kesejahteraan rakyat. Aktivitas seperti bakti sosial, penyuluhan kesehatan, dan pendampingan UMKM menjadi strategi untuk membangun kepercayaan dan kedekatan emosional dengan konstituen.

Konteks Pilkada Gubernur Sulawesi Selatan 2024, secara keseluruhan, menunjukkan adanya transisi dari kampanye politik yang berbasis mesin partai menuju kampanye yang lebih partisipatif dan berbasis masyarakat sipil. Relawan Dozer muncul sebagai representasi dari gelombang baru partisipasi politik yang lebih otonom, kreatif, dan responsif terhadap dinamika lokal. Namun, tantangan tetap ada: memastikan bahwa gerakan relawan tidak terkooptasi oleh kepentingan elite tertentu, serta menjaga agar partisipasi politik tetap berjalan dalam koridor demokrasi yang sehat dan berkelanjutan pasca-pemilihan. Penelitian terhadap strategi politik Relawan Dozer dalam menggalang dukungan bagi pasangan Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi menjadi penting untuk

memahami bagaimana aktor-aktor politik non-partisan berkontribusi terhadap penguatan demokrasi lokal di Sulawesi Selatan.

C. Pokok Masalah

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2024 menunjukkan akan kuatnya peran relawan politik sebagai aktor non-formal yang beroperasi di luar struktur partai, namun memiliki daya jangkauan langsung terhadap pemilih. Salah satu fenomena yang menonjol adalah hadirnya Relawan Dozer yang secara aktif menggalang dukungan bagi pasangan Andi Sudirman Sulaiman – Fatmawati Rusdi.

Relawan politik sering dipersepsikan sebagai aktor spontan dan sukarela. Kenyataannya, keberadaan relawan tidak pernah benar-benar netral. Ia melibatkan proses mobilisasi, relasi kuasa, serta pertukaran kepentingan yang bersifat material maupun non-material. Relawan bukan sekadar “pendukung”, tetapi bagian dari strategi politik elektoral yang terorganisasi meski tidak selalu dilembagakan secara formal. Selain itu, relasi antara relawan dan pemilih tidak hanya berlangsung dalam bentuk persuasi ideologis, tetapi juga melalui kedekatan sosial, jaringan lokal, dan logika timbal balik. Relasi ini berpengaruh langsung terhadap bentuk partisipasi politik pemilih, mulai dari dukungan simbolik hingga keterlibatan aktif dalam kampanye.

Hal tersebut diatas dapat menjadi permasalahan ketika dukungan relawan harus dipertahankan sepanjang tahapan Pilkada. Prinsip pertukaran kepentingan berperan penting, apa yang diberikan relawan, apa yang dijanjikan, dan bagaimana ekspektasi tersebut mempengaruhi

keberlanjutan loyalitas politik, tanpa memahami mekanisme pertukaran ini, relawan sering kali direduksi menjadi aktor normatif, padahal mereka beroperasi dalam arena politik yang sangat rasional. Oleh karena itu, pokok masalah dalam disertasi ini terletak pada bagaimana relawan politik dibentuk, membangun relasi dengan pemilih, melakukan pertukaran kepentingan dalam Pilkada Sulawesi Selatan 2024.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pokok masalah yang telah dikemukakan, akan dirumuskan dalam bentuk rumusan permasalahan sebagai berikut;

1. Bagaimana proses terbentuknya relawan politik Dozer yang mendukung pasangan Andi Sudirman Sulaiman – Fatmawati Rusdi di Pilkada Sulawesi Selatan 2024?
2. Bagaimana relasi antara relawan dan pemilih dalam membentuk partisipasi politik bagi pasangan Andi Sudirman Sulaiman – Fatmawati Rusdi di Pilkada Sulawesi Selatan 2024?
3. Bagaimana prinsip pertukaran kepentingan mempengaruhi dukungan relawan dalam Pilkada Sulawesi Selatan 2024?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dan menjelaskan proses terbentuknya relawan politik yang mendukung pasangan Andi Sudirman Sulaiman – Fatmawati Rusdi dalam Pilkada Sulawesi Selatan 2024.

2. Menganalisis dan menjelaskan interaksi antara relawan dan pemilih dalam membentuk partisipasi politik di tingkat lokal.
3. Menganalisis dan menjelaskan prinsip pertukaran kepentingan dalam keberlanjutan gerakan relawan.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam kajian ilmu politik, khususnya terkait dengan peran relawan dalam dinamika politik elektoral di Indonesia. Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik:

- a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori politik, khususnya dalam memahami peran relawan sebagai aktor politik non-partai dalam sistem demokrasi Indonesia.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan khususnya bidang ilmu Politik khususnya dalam menentukan Bagaimana strategi dan peranan politik Masyarakat dalam Pemilu presiden dan Pilkada.
- c. Sebagai bahan masukan untuk peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang masalah bidang ilmu Politik khususnya dalam menentukan Bagaimana strategi dan peranan politik Masyarakat dalam Pemilu presiden dan Pilkada.

2. Manfaat Praktis:

- a. Hasil penelitian manfaatnya untuk Universitas Hasanuddin agar sebagai wadah tempat menimba ilmu dapat selalu

mampu memberikan stimulus untuk terus melakukan penelitian-penelitian dibidang Ilmu Politik dan terus membantu memberi pencerahan kepada masyarakat tentang pentingnya keterlibatan masyarakat di bidang Politik

- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu membuka pikiran dan kesadaran bahwa masyarakat Indonesia harus mampu mewujudkan kedaulatannya dibidang politik dengan melibatkan langsung dirinya dalam pelaksanaan politik dinegeri ini seperti yang tercermin pada pelaksanaan Pemilu Presiden dan Pilkada beberapa waktu belakangan ini. Menghilangkan rasa skeptis masyarakat terhadap urusan yang berbau politik harus terus dilakuakn oleh semua pihak baik lembaga negara, praktisi politik dan civitas Akademika.
- c. Menjadi masukan bagi KPU, Bawaslu, dan lembaga pengawas lain untuk menutup celah politik uang serta mempromosikan kampanye yang lebih bersih dan beretika.

G. Kerangka Teoritik

Kerangka teoretik penelitian ini disusun untuk memberikan landasan konseptual dalam menganalisis strategi politik Relawan Dozer dalam menggalang dukungan terhadap pasangan Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2024. Kerangka ini *pertama*, diawali dengan penegasan

paradigma demokrasi sebagai kubu berpikir penelitian; *kedua*, penggunaan teori-teori yang relevan sebagai alat analisis, *ketiga*, penelaahan penelitian terdahulu untuk memetakan posisi dan celah penelitian, *keempat*, perumusan kerangka pikir penelitian; *kelima*, skema pikir penelitian sebagai representasi visual yang menunjukkan keterkaitan antarunsur kerangka teoretik dalam menjawab rumusan masalah penelitian. kelima unsur tersebut diuraikan sebagai berikut.

1. Paradigma Demokrasi

Dalam ilmu sosial dan politik, paradigma dipahami sebagai kubu berpikir (*school of thought*) yang memuat seperangkat asumsi dasar, nilai, dan cara pandang tertentu dalam memahami realitas sosial. Paradigma berfungsi sebagai posisi intelektual peneliti dalam melihat dunia sosial, menentukan apa yang dianggap sebagai persoalan utama, aktor yang relevan, serta hubungan antara struktur dan tindakan. Dengan demikian, paradigma bukan sekadar pilihan metodologis, melainkan fondasi teoretis yang membimbing arah analisis dan penafsiran fenomena sosial-politik (Kuhn, 1970:10–11).

Berangkat dari pengertian tersebut, paradigma demokrasi merupakan kubu berpikir yang menempatkan demokrasi sebagai sistem dan proses politik yang berlandaskan kedaulatan rakyat, partisipasi warga negara, serta kompetisi kekuasaan yang berlangsung secara terbuka. Dalam paradigma ini, demokrasi tidak dipahami semata-mata sebagai prosedur elektoral melalui pemilu, tetapi sebagai praktik sosial yang hidup, di mana

warga negara terlibat secara aktif dalam pembentukan kehendak politik, baik melalui institusi formal maupun melalui saluran-saluran nonformal di masyarakat sipil (Dahl, 1989:221–224).

Dalam konteks disertasi Strategi Politik Relawan Dozer dalam Menggalang Dukungan terhadap pasangan Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2024, paradigma demokrasi digunakan untuk memosisikan relawan Dozer sebagai aktor demokrasi non-negara. Relawan tidak dipahami sekadar sebagai perpanjangan tangan kandidat atau mesin elektoral informal, melainkan sebagai manifestasi partisipasi politik warga yang bekerja di luar struktur partai, dengan memanfaatkan jejaring sosial, kedekatan kultural, dan komunikasi interpersonal di tingkat akar rumput.

Pada titik ini, paradigma demokrasi dalam penelitian ini secara langsung bertaut dengan teori-teori yang digunakan. Praktik relawan Dozer merefleksikan teori demokrasi partisipatoris yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif warga negara dalam proses politik sebagai prasyarat demokrasi yang substantif (Pateman, 1970:42–44). Selain itu, keterlibatan sukarela relawan dalam menggalang dukungan politik sejalan dengan teori partisipasi politik yang memandang aktivitas warga—baik konvensional maupun nonkonvensional—sebagai elemen kunci dalam distribusi kekuasaan demokratis (Verba, Schlozman, & Brady, 1995:37–39). Lebih jauh, strategi relawan yang berbasis jaringan sosial dan solidaritas komunitas juga mengonfirmasi teori mobilisasi sumber daya, yang menjelaskan bahwa keberhasilan gerakan politik sangat ditentukan oleh

kemampuan aktor memobilisasi jaringan, komitmen, dan sumber daya non-material secara efektif (McCarthy & Zald, 1977:1215–1217).

Dengan demikian, paradigma demokrasi dalam disertasi ini tidak hanya berfungsi sebagai latar normatif, tetapi sebagai kerangka analitis yang menghubungkan praktik empirik relawan Dozer dengan teori demokrasi, partisipasi politik, dan mobilisasi. Paradigma ini menegaskan bahwa strategi politik relawan Dozer merupakan bagian dari dinamika demokrasi kontemporer, di mana warga negara tampil sebagai aktor aktif dalam proses elektoral, bukan sekadar objek mobilisasi politik.

2. Penggunaan Teori

Penelitian ini menggunakan delapan teori yang saling melengkapi dan membentuk kerangka analitis berlapis. Kedelapan teori tersebut disusun secara sistematis mengikuti logika analisis dari tingkat makro-strategis hingga mikro-operasional. Pertama, **teori strategi politik** digunakan untuk menjelaskan bagaimana relawan dibentuk dan digerakkan sebagai bagian dari desain kemenangan elektoral. Kedua, **teori partisipasi politik** digunakan untuk membaca relasi relawan dengan pemilih dan dampaknya terhadap kualitas keterlibatan warga dalam proses politik. Ketiga, **teori pertukaran kepentingan** digunakan untuk menganalisis dimensi relasional dan instrumental yang menopang keberlanjutan dukungan relawan dalam konteks Pilkada. Keempat, **teori organisasi politik** digunakan untuk menelaah bagaimana struktur, hierarki, dan mekanisme koordinasi internal relawan dirancang agar efektif sebagai organisasi mobilisasi. Kelima, **teori**

perilaku pemilih digunakan untuk memahami tipologi dan karakteristik pemilih yang menjadi sasaran pendekatan relawan di lapangan. Keenam, **teori jaringan sosial** digunakan untuk menganalisis bagaimana modal sosial dan relasi antaraktor menjadi infrastruktur penggerak mobilisasi dukungan. Ketujuh, **Teori kampanye politik modern** digunakan untuk membaca strategi komunikasi dan pendekatan lapangan relawan dalam konteks kampanye kontemporer yang berbasis data dan segmentasi. Kedelapan, **teori manajemen kinerja** digunakan untuk menganalisis bagaimana organisasi relawan mengelola, mengevaluasi, dan mempertahankan efektivitas kerja anggotanya sepanjang siklus Pilkada. Kedelapan teori tersebut diuraikan sebagai berikut:

2.1 Teori Strategi Politik

Strategi adalah rencana jangka panjang dengan diikuti tindakan-tindakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu, yang umumnya adalah "kemenangan". Strategi relawan merupakan salah satu instrumen krusial bagi seorang kandidat dalam kontestasi politik, terutama dalam pemilihan umum Presiden, Gubernur, Walikota/ Bupati. Melalui strategi relawan yang efektif, seorang calon pemimpin dapat membangun dukungan politik serta menarik simp zati masyarakat sebagai upaya memenangkan kontestasi politik seperti halnya strategi politik dapat dikatakan sebagai pendekatan, taktik maupun metode yang digunakan oleh aktor politik untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan teori strategi politik yang sering digunakan pada kontestasi politik.

Teori strategi politik pada dasarnya merujuk pada kumpulan pemikiran mengenai bagaimana aktor-aktor politik termasuk kandidat, partai, maupun pendukungnya mengatur langkah-langkah terencana untuk mencapai tujuan elektoral tertentu. Konsep "strategi" sendiri awalnya berasal dari ranah militer, yang menitikberatkan pada seni merancang serangkaian manuver untuk memenangkan perang. Seiring berjalannya waktu, istilah ini diadopsi ke dalam bidang politik, dengan substansi bahwa "peperangan" diganti menjadi perebutan kekuasaan secara damai dan demokratis. Kotler dan Kotler (1999: 17) menjelaskan bahwa strategi politik dalam pemilihan umum (pemilu) maupun pemilihan kepala daerah (pilkada) menuntut adanya peta jalan yang memandu kampanye dari tahap paling awal, seperti analisis kekuatan dan kelemahan diri sendiri, hingga tahap pascapemilihan dalam mempertahankan legitimasi kekuasaan.

Pemikiran mengenai strategi politik semakin relevan seiring dengan meningkatnya kompetisi di sistem demokrasi modern. Kandidat maupun partai politik tidak hanya bersaing di ranah programatik, tetapi juga berlomba membentuk persepsi publik yang menguntungkan. Dalam hal ini, teori strategi politik menjadi instrumen analitis untuk memahami bagaimana para aktor tersebut memanfaatkan berbagai sumber daya termasuk dana, jejaring sosial, hingga teknologi komunikasi demi memengaruhi preferensi pemilih. Menurut Kotler dan Keller (2016: 35), perkembangan teknologi digital turut memperumit konteks strategi politik, karena pemilih kini dapat dijangkau lewat berbagai saluran sekaligus, mulai dari televisi, media cetak, hingga media sosial interaktif. Di tengah situasi demikian, para akademisi

dan praktisi kian menaruh perhatian pada bagaimana merumuskan, mengeksekusi, serta menyesuaikan strategi politik agar cocok dengan realitas sosial yang terus berubah.

Terminologi "strategi" dalam politik mencakup setidaknya dua dimensi pokok. Pertama, ada dimensi "perencanaan," yang menuntut kandidat atau partai melakukan pemetaan menyeluruh terhadap lanskap politik: siapa lawannya, bagaimana karakteristik pemilih, serta isu apa yang paling memicu perhatian publik. Kedua, terdapat dimensi "eksekusi," di mana segala rancangan dialihkan menjadi rangkaian taktik konkrit: penyusunan pesan kampanye, penempatan alat peraga, mobilisasi massa, dan pengelolaan relawan. Semua rangkaian ini bersifat iteratif. Tim sukses melakukan evaluasi berkala, mengukur tanggapan pemilih, lalu merumuskan ulang strategi sesuai data lapangan. Logika iteratif inilah yang memungkinkan kampanye politik bersifat adaptif, sehingga konsep "strategi" senantiasa menggambarkan proses dinamis, bukan sekadar cetak biru statis (Kotler & Keller, 2016: 37).

Penggunaan istilah "strategi" dalam domain politik dapat dilacak dari pemikiran Niccolò Machiavelli di era Renaissance. Dalam "The Prince" (1532/1998: 39), Machiavelli membahas bagaimana seorang penguasa harus cerdik memelihara kekuasaan, termasuk menggunakan tipu muslihat atau kelihaihan untuk meredam ancaman. Meskipun tidak dibahas dalam kerangka demokrasi elektoral, karyanya memberikan dorongan awal mengenai "siasat" yang harus dijalankan seorang pemimpin demi

mempertahankan legitimasi. Konsep ini, pada abad ke-19 dan ke-20, bertransformasi ketika sistem demokrasi perwakilan semakin populer di Eropa dan Amerika Serikat.

Anthony Downs (1957: 112) dikenal sebagai salah satu pencetus pemikiran strategis modern di bidang politik, khususnya melalui pendekatan pilihan rasional (*rational choice*). Ia menjabarkan bahwa pemilih dan kandidat sama-sama berperilaku rasional, yakni menimbang untung rugi demi memaksimalkan utilitas masing-masing. Kandidat akan mengubah posisi ideologis dan programnya agar selaras dengan preferensi mayoritas pemilih, sedangkan pemilih memilih kandidat yang menawarkan paket kebijakan terbaik menurut perhitungan pribadi. Pemikiran Downs memantik perhatian luas dalam ilmu politik, menandai lahirnya gagasan bahwa strategi politik bukan semata pertarungan karisma, melainkan proses kalkulasi yang relatif rasional.

Tawaran Downs diikuti dengan berkembangnya teori kompetisi politik, di mana pemilu dianalogikan seperti pasar bebas yang diisi oleh penawaran kebijakan. Muncul juga teori agenda-setting (Cohen, 1963: 16) yang menegaskan peran media dalam menentukan isu utama di mata publik. Para kandidat yang mahir mengendalikan wacana publik akan diuntungkan, sebab pemilih cenderung membentuk preferensi atas dasar isu yang sedang hangat dibicarakan. Dalam konteks ini, teori strategi politik menyadari bahwa mengarahkan perhatian publik sama pentingnya dengan

"menyusun kebijakan," karena pemilih umumnya memberi bobot lebih pada isu yang sering dibahas (Kotler & Kotler, 1999: 24).

Perkembangan selanjutnya, seiring terbentuknya pasar politik yang kian kompetitif, melahirkan teori pemasaran politik (Newman, 1994: 37). Pendekatan ini mengadopsi metode pemasaran komersial, seperti segmentasi pasar, branding, serta pengelolaan citra, untuk mempengaruhi perilaku pemilih. Di sini, kandidat dipandang sebagai produk, sedangkan pemilih adalah konsumen politik. Setiap kampanye dianggap sukses jika mampu memahami kebutuhan pemilih (lewat riset, survei, focus group), lalu menyesuaikan pesan dan penawaran kebijakannya (Lees-Marshment, 2001: 78). Era digital kemudian semakin memperkaya diskursus ini, menghadirkan konsep micro-targeting dan big data. Norris (2020: 44) menekankan bahwa media sosial membuka ruang baru bagi tim kampanye untuk menyasar segmentasi pemilih yang sangat spesifik, misalnya pemilih muda perkotaan dengan minat tertentu.

Teori mobilisasi sosial (Tarrow, 1996: 157) juga turut memengaruhi pemahaman strategi politik. Jika teori pilihan rasional berfokus pada kalkulasi kepentingan, maka pendekatan mobilisasi menyoroiti bagaimana aktor politik membangun identitas kolektif, framing isu, hingga kontak interpersonal untuk mengubah apatisme pemilih menjadi partisipasi aktif. Ranah ini sangat terkait dengan relawan politik, karena relawan menjadi agen penggerak di level akar rumput. Dalam studi gerakan sosial, relawan dipandang memiliki peran strategis dalam membangun "*chemistry*" antara

kandidat dan komunitas lokal. Dalton (2017: 83) mencatat bahwa mobilisasi berbasis relawan cenderung menumbuhkan semangat kebersamaan dan kepercayaan, efek yang sulit ditandingi oleh kampanye satu arah seperti iklan televisi.

Dari ragam pemikiran ini, teori strategi politik akhirnya dirajut menjadi kerangka konseptual komprehensif, mencakup perencanaan kebijakan, pemetaan pemilih, perancangan pesan, manajemen relawan, hingga evaluasi kampanye. Kotler dan Keller (2016: 40) menegaskan bahwa strategi politik bukan sekadar soal apa yang ditawarkan, melainkan bagaimana menawarkan, di mana menawarkan, dan kapan menawarkan. Dengan kata lain, aspek taktis sangat menonjol dalam teori ini, sebab kekeliruan dalam memilih waktu, saluran, atau pendekatan komunikasi bisa berakibat fatal bagi elektabilitas kandidat.

Kajian tentang pembentukan relawan politik, khususnya di Pilkada atau pemilu Indonesia, memerlukan landasan teori strategi politik karena sejumlah alasan. Pertama, teori ini menjelaskan bahwa inisiatif mengorganisir relawan bukan sekadar gerakan spontan, melainkan bagian dari rencana kampanye yang disusun secara sadar. Bahkan pada kasus ketika relawan tampak "tumbuh sendiri," sering kali tim sukses menyadari potensi gerakan tersebut, lalu memberi dukungan berupa materi sosialisasi, atribut kampanye, atau bantuan logistik. Dengan kata lain, keberadaan relawan dapat diintegrasikan ke dalam skema strategi politik menyeluruh (Kotler & Keller, 2016: 70).

Kedua, teori strategi politik menggarisbawahi pentingnya segmentasi pemilih. Jika sebuah komunitas relawan terbentuk di kalangan nelayan atau guru, maka tim kampanye memanfaatkan itu dengan menyediakan narasi kampanye seputar profesi terkait. Terjadi semacam aliansi mutualistik: relawan memperoleh pengakuan atas identitas kelompoknya, sedangkan kandidat mendapat akses ke basis suara spesifik (Lees-Marshment, 2001: 94). Ketiga, teori strategi politik memandang kampanye sebagai proses adaptif. Pembentukan relawan sering terjadi ketika tim kampanye menyadari kelemahan mereka di lapangan atau menilai bahwa saluran partai formal kurang efektif. Keputusan merekrut relawan melibatkan kalkulasi rasional mengenai keuntungan (peningkatan jangkauan, partisipasi) dan risiko (ketidakpatuhan, inkonsistensi).

Keempat, teori strategi politik berguna untuk mengevaluasi sejauh mana kampanye melalui relawan berkontribusi pada hasil akhir pemilihan. Dalam banyak studi, indikator keberhasilan bukan semata perolehan suara, melainkan juga naiknya partisipasi politik dan berkurangnya tingkat apatisisme (Dalton, 2017: 104). Dengan analisis mendalam, peneliti dapat menilai apakah strategi mobilisasi relawan benar-benar menambah basis dukungan atau hanya menjadi gerakan simbolis yang kurang berdampak. Pertanyaan lain ialah apakah relawan bisa bertahan pasca-pemilihan, bertransformasi menjadi komunitas yang mengawal pemerintahan. Jika jawabannya ya, maka teori strategi politik perlu dikembangkan ke arah teori "strategi pemerintahan," karena dampak mobilisasi tidak berhenti di hari pencoblosan.

2.1.1 Dimensi dalam Strategi Politik

Teori strategi politik setidaknya memuat beberapa dimensi kunci. Pertama, ada dimensi perencanaan kampanye. Kandidat menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT) di panggung politik, kemudian menetapkan sasaran yang hendak dicapai. Sasaran itu dapat berupa target perolehan suara, target wilayah tertentu yang mesti dimenangkan, atau target segmen pemilih tertentu. Perencanaan ini kian efektif jika didukung data empirik dari survei atau riset lapangan. Newman (1994: 39) menyatakan bahwa tanpa perencanaan berbasis riset, kampanye cenderung berlangsung sporadis dan tidak efisien.

Kedua, dimensi eksekusi di lapangan. Ini mencakup mobilisasi sumber daya (finansial, jaringan sosial, relawan) serta penyusunan pesan komunikasi. Lees-Marshment (2001: 78) menekankan pentingnya menyesuaikan konten kampanye dengan kebutuhan tiap segmen pemilih. Apabila segmen petani dihadapkan pada problem pupuk dan harga jual rendah, maka isu tersebut diutamakan untuk dibahas relawan saat berinteraksi di lapangan. Jika segmen pemuda dominan di perkotaan, pesan kampanye bisa difokuskan pada isu inovasi teknologi, kewirausahaan, atau lapangan kerja. Dalam teori pemasaran politik, aktivitas semacam ini disebut segmentasi dan targeting.

Ketiga, dimensi komunikasi politik dan framing isu. Kandidat atau tim sukses menentukan isu kunci yang akan dijadikan jualan utama. Jika di suatu daerah permasalahan layanan kesehatan mendesak, maka

kampanye mungkin menonjolkan janji perbaikan Puskesmas dan asuransi kesehatan murah. Strategi politik menuntut konsistensi dan koherensi pesan. Kotler dan Keller (2016: 65) menegaskan bahwa sebuah "brand" kandidat harus melekat dalam benak publik, dibentuk oleh narasi kampanye, penampilan sang kandidat, hingga aktivitas para pendukung. Pada tahapan ini, relawan politik menjadi aktor lapangan yang mengartikulasikan brand kandidat, baik secara daring melalui media sosial maupun tatap muka lewat kegiatan komunitas.

Keempat, dimensi evaluasi dan adaptasi. Setiap kampanye lazimnya melakukan survei berkala untuk mengetahui pergeseran preferensi pemilih. Hasil survei menjadi dasar untuk menyesuaikan tema kampanye, menambah intensitas sosialisasi di area yang lemah, atau berpindah fokus ke segmen yang lebih strategis. Ketika sebuah isu baru mencuat, tim sukses harus tanggap memasukkan isu itu ke dalam materi kampanye, atau jika isu itu negatif, mereka perlu meluncurkan kontra-narasi. Norris (2020: 62) menyebut ini sebagai upaya "kelincahan politik," ciri kampanye modern yang tidak lagi bergantung pada jadwal tetap, melainkan merespons real-time terhadap dinamika publik

Relawan politik menjadi salah satu komponen yang semakin menonjol dalam lanskap elektoral kontemporer. Jika partai politik menugaskan kader struktural, maka gerakan relawan umumnya bersifat sukarela, diinisiasi oleh publik yang merasa tergerak mendukung kandidat tertentu. Dalam teori strategi politik, keberadaan relawan dapat dilihat sebagai elemen mobilisasi

yang memungkinkan tim kampanye menjangkau pemilih secara lebih personal. Dalton (2017: 83) menekankan bahwa relawan memperluas kapasitas kampanye, sebab mereka rela turun ke lapangan menemui pemilih, menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, bahkan mengedukasi warga mengenai visi dan program kandidat.

Pada hakikatnya, relawan politik memadukan konsep pemasaran politik dengan mobilisasi sosial. Di satu sisi, mereka menerapkan pendekatan "agen pemasaran," menyebarkan informasi mengenai kandidat seperti kelebihan, rekam jejak, maupun tawaran kebijakan tertentu. Di sisi lain, mereka mempraktikkan prinsip mobilisasi gerakan sosial, di mana semangat kolektif dan ikatan emosional menjadi landasan perekrutan relawan baru. Tarrow (1996: 160) menulis bahwa gerakan relawan sering bersandar pada identitas bersama (etnis, kedaerahan, agama, atau nilai tertentu) yang mengikat para pendukung untuk bertahan, sekalipun kampanye menghadapi tantangan atau keterbatasan dana.

Kotler dan Kotler (1999: 29) menilai bahwa mobilisasi relawan efektif apabila tim sukses memberikan pelatihan memadai. Pelatihan ini mencakup pemahaman visi-misi kandidat, pengetahuan atas isu-isu lokal, keterampilan berkomunikasi, hingga cara menanggapi isu sensitif dari lawan. Materi sosialisasi disusun agar relawan menyampaikan pesan yang selaras dengan branding kandidat. Dengan demikian, meski tersebar di berbagai wilayah, setiap relawan membawa pesan kampanye yang relatif konsisten. Dalam kacamata teori strategi politik, keseragaman narasi ini

penting demi menjaga integritas brand kandidat (Kotler & Keller, 2016: 65). Apabila pesan relawan di lapangan terlalu bervariasi atau bahkan bertentangan satu sama lain, publik akan menilai kandidat tidak memiliki identitas dan program yang jelas.

Hal menarik lain adalah peran teknologi digital dalam memfasilitasi koordinasi relawan. Norris (2020: 66) mencontohkan bahwa grup WhatsApp, Telegram, atau platform serupa, memungkinkan manajemen kampanye menyebarkan instruksi cepat, merespons isu negatif, dan memonitor aktivitas relawan. Sebaliknya, relawan dapat dengan mudah melaporkan kondisi lapangan dan meminta arahan. Alur komando pun menjadi lebih fleksibel, karena setiap relawan memiliki akses langsung ke sumber informasi. Di satu sisi, ini menurunkan biaya kampanye, sebab ribuan relawan tidak memerlukan markas fisik untuk rapat rutin. Namun, di sisi lain, tim pusat harus berhati-hati mengawasi agar isu hoaks atau ujaran kebencian tidak malah disebarkan oleh relawannya sendiri. Dalam teori strategi politik, dinamika ini disebut sebagai "tantangan kendali" (control challenge), karena relawan bukan staf bergaji yang dapat dikenai sanksi tegas jika melakukan pelanggaran (Dalton, 2017: 92).

2.1.2 Pemasaran Politik

Pemasaran politik adalah konsep yang berkembang seiring dengan perubahan dinamika politik dan kemajuan teknologi komunikasi. Secara umum, pemasaran politik merujuk pada strategi dan teknik pemasaran yang diterapkan dalam ranah politik untuk membangun citra kandidat,

mempengaruhi opini publik, serta memperoleh dan mempertahankan dukungan pemilih. Konseptualisasi pemasaran politik telah banyak dikaji oleh para ahli dengan berbagai pendekatan teoritis.

Pemasaran politik didefinisikan sebagai proses strategis yang digunakan oleh kandidat, partai politik, atau kelompok kepentingan untuk merancang, menyampaikan, dan menyebarkan pesan politik kepada audiens yang dituju. Kotler dan Kotler (1999, hlm. 65) mendefinisikan pemasaran politik sebagai "serangkaian proses yang digunakan oleh organisasi politik untuk menarik pemilih dan mendapatkan dukungan melalui strategi pemasaran yang efektif."

Bruce Newman (1994, hlm. 37), salah satu tokoh utama dalam kajian pemasaran politik, menekankan bahwa pemasaran politik mengadopsi pendekatan yang sama dengan pemasaran komersial, tetapi dengan tujuan politik. Menurutnya, pemasaran politik mencakup perancangan pesan politik, komunikasi dengan pemilih, serta pengelolaan citra kandidat atau partai politik.

Menurut Lees-Marshment (2001, hlm. 78), pemasaran politik terdiri dari tiga model utama:

1. *Product-Oriented Party* (Partai Berorientasi Produk) – Fokus pada kebijakan dan ideologi tanpa banyak menyesuaikan dengan keinginan pemilih.

2. *Sales-Oriented Party* (Partai Berorientasi Penjualan) – Menggunakan teknik kampanye untuk menjual kandidat atau kebijakan kepada pemilih tanpa banyak menyesuaikan dengan kebutuhan mereka.
3. *Market-Oriented Party* (Partai Berorientasi Pasar) – Menganalisis keinginan pemilih terlebih dahulu, lalu menyesuaikan kebijakan dan strategi kampanye berdasarkan kebutuhan pasar politik.

Teori Pemasaran politik (*Political Marketing*) menjadi salah satu strategi yang digunakan oleh kandidat atau partai politik untuk membangun citra, menarik simpati publik, serta memperoleh dukungan dalam kontestasi politik. Kotler dan Kotler (1999 hlm. 48), marketing politik merupakan proses di mana calon pemimpin atau partai mengembangkan dan menyampaikan pesan kepada publik untuk mendapatkan suara dalam. Newman (1993, hlm.70) menjelaskan bahwa marketing politik mengadopsi prinsip-prinsip pemasaran bisnis dalam dunia politik, termasuk segmentasi pasar, targeting pemilih, serta positioning kandidat. Dalam konteks ini, kandidat diperlakukan sebagai “produk” yang harus dikemas dan dipromosikan secara efektif kepada pemilih. Selain itu, Politik Branding (*Political branding*) sering digunakan sebagai strategi yang di mana individu atau aktor politik membangun citra dan identitas diri sebagai sebuah merek (brand) yang dapat dikenali dan diterima oleh publik. Konsep ini tidak hanya diterapkan pada figur publik seperti selebriti, tetapi juga pada politisi yang ingin memperoleh legitimasi dan dukungan dari masyarakat. Political branding tidak hanya sekadar membangun popularitas, tetapi juga

berkaitan dengan bagaimana seorang kandidat memasarkan dirinya secara sistematis melalui serangkaian strategi komunikasi yang efektif (Scammell, 2015, hlm. 7).

Dalam konteks politik, branding merupakan sebuah seni untuk membangun dan mengelola persepsi publik secara aktif dengan menekankan aspek-aspek yang menjadi nilai unggul dari seorang kandidat. Proses ini memerlukan identifikasi terhadap elemen-elemen yang memiliki nilai diferensiasi, sehingga dapat membangun daya tarik yang kuat di mata pemilih (Needham, 2006, hlm.78). Kandidat perlu menggali keunggulan personal yang dapat dikomunikasikan kepada publik agar citra yang terbentuk sesuai dengan harapan serta relevan dengan kebutuhan konstituen.

Personal branding dalam ranah politik dapat dibangun melalui berbagai elemen, seperti nama, simbol, tanda, atau desain yang berfungsi sebagai pembeda dengan kompetitor politik lainnya (Johnson, 2017, hlm. 21). tujuan utama dari *political branding* adalah membangun kesadaran dan pengenalan masyarakat terhadap kandidat, menciptakan keunggulan kompetitif yang membedakan kandidat dari pesaing, serta membangun citra yang diinginkan dalam benak pemilih (Pich & Dean, 2015, hlm.1353). Selain itu, keberhasilan *political branding* juga ditentukan oleh tingkat konsistensi kandidat dalam menyampaikan pesan politiknya, sehingga menciptakan kredibilitas dan kepercayaan publik yang lebih tinggi.

Beberapa pendekatan dalam *political branding* dapat mencakup Penggunaan Sosial media yang massif, komunikasi yang dilakukan secara tatap muka dengan masyarakat sebagai calon pemilih serta pengumpulan data pemilih yang akurat . Dengan menerapkan strategi yang tepat, seorang kandidat dapat membangun ekuitas merek politik yang kuat, meningkatkan daya saing dalam kontestasi elektoral (Smith & French, 2011, hlm.718).

Berkaitan dengan teori tersebut strategi Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sulawesi Selatan tahun 2024, pasangan Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi, yang dikenal dengan sebutan "Andalan Hati", menerapkan berbagai strategi *political branding* yang efektif untuk meraih kemenangan. Pasangan Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi, Mengadakan kampanye akbar yang merupakan bentuk marketing politik yang efektif untuk meningkatkan visibilitas kandidat dan menunjukkan kekuatan dukungan massa. Selain itu politik branding didesain untuk menghadirkan tokoh nasional dan hiburan dari artis terkenal membantu dalam membangun citra positif dan meningkatkan daya tarik pasangan calon di mata pemilih. Pasangan Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi berhasil menerapkan strategi pemasaran politik yang komprehensif dengan memanfaatkan promosi melalui kampanye akbar, menawarkan program kerja nyata yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjaga integritas dan mengelola koalisi serta relawan secara efektif. Pendekatan ini sejalan dengan konsep-konsep dalam teori pemasaran politik, seperti *marketing mix* dan orientasi pasar, yang

berkontribusi pada kemenangan mereka dalam Pilkada Sulawesi Selatan 2024.

Strategi Relawan politik menggunakan berbagai metode untuk memperoleh data pemilih, antara lain:

1. Survei Tatap Muka

Melaksanakan interaksi langsung dengan pemilih untuk memverifikasi informasi dan preferensi politik mereka. Efektif dalam meningkatkan kepercayaan pemilih terhadap kandidat.

2. Pencatatan dan Verifikasi Digital

Penggunaan teknologi seperti aplikasi mobile atau perangkat lunak basis data untuk menyimpan dan memvalidasi informasi pemilih sekaligus meminimalkan kesalahan manusia dalam pencatatan data.

3. Pendekatan *Door-to-Door* (dari pintu ke pintu)

Salah satu metode tradisional yang masih efektif dalam menjangkau pemilih di berbagai daerah. Memungkinkan penyesuaian strategi kampanye berdasarkan respons langsung dari pemilih.

4. Analisis Media Sosial dan Data Publik

Memanfaatkan big data dan media sosial untuk melengkapi informasi pemilih yang telah dikumpulkan secara manual. Membantu dalam identifikasi tren dan preferensi pemilih.

Strategi Pengumpulan data pemilih yang akurat oleh relawan politik merupakan proses yang kompleks tetapi esensial dalam kampanye politik. Penerapan metode yang tepat ini dan memperhatikan tantangan yang ada, efektivitas strategi kampanye dapat ditingkatkan. Kombinasi antara pendekatan tradisional dan teknologi modern dapat membantu dalam menghasilkan data yang lebih akurat dan dapat diandalkan untuk mendukung kekuatan politik.

2.1.3 Pencitraan Politik

Pencitraan politik merupakan salah satu aspek penting dalam pemasaran politik. Teori pencitraan politik menjelaskan bagaimana citra seorang kandidat atau partai politik dapat dibangun, dipertahankan, dan dikomunikasikan kepada publik untuk memperoleh dukungan politik. Citra politik mencerminkan bagaimana seorang pemimpin atau partai dipersepsikan oleh pemilih, yang dapat dipengaruhi oleh media, komunikasi politik, dan strategi pemasaran politik yang digunakan.

Teori Pencitraan Politik menekankan bahwa keberhasilan seorang kandidat dalam memperoleh dukungan politik sangat bergantung pada bagaimana ia membangun dan mempertahankan citra dirinya di hadapan publik (Newman, 1999, hlm. 21). Dalam konteks politik modern, pencitraan bukan sekadar bagaimana seorang pemimpin tampil di hadapan masyarakat, tetapi juga bagaimana ia dikonstruksi melalui media dan strategi komunikasi politik (McNair, 2011, hlm. 89). Citra politik yang kuat dapat menciptakan kepercayaan, loyalitas, dan keterikatan emosional

antara pemimpin dan pemilih, sehingga memengaruhi preferensi politik masyarakat dalam menentukan pilihan mereka di pemilu (Maarek, 2011, hlm. 46).

Menurut Grabe & Bucy (2009, hlm. 37), pencitraan politik melibatkan tiga aspek utama: (1) personalisasi kandidat, (2) simbolisasi kepemimpinan, dan (3) narasi media. Personalisasi kandidat berarti menampilkan seorang pemimpin sebagai figur yang dekat dengan rakyat, memiliki kepribadian yang kuat, dan dapat diandalkan. Simbolisasi kepemimpinan mengacu pada penggunaan elemen visual, gaya komunikasi, dan retorika yang membangun kesan sebagai pemimpin yang kompeten dan visioner. Sementara itu, narasi media berperan dalam membentuk persepsi publik melalui pemberitaan, kampanye digital, dan representasi di media sosial (Strömbäck, 2008, hlm. 236).

Pencitraan politik juga berhubungan erat dengan strategi kampanye dan branding kandidat. Penggunaan media sosial, iklan politik, serta pengelolaan krisis dalam komunikasi politik menjadi bagian integral dalam membangun citra yang positif di mata pemilih (Esser & Strömbäck, 2014, hlm. 51). Studi Newman (2016, hlm. 73) menunjukkan bahwa kandidat yang mampu mengelola citranya dengan baik cenderung memiliki tingkat elektabilitas yang lebih tinggi, terutama dalam era digital di mana arus informasi begitu cepat dan mudah diakses. Oleh karena itu, keberhasilan pencitraan politik tidak hanya bergantung pada kualitas individu seorang

pemimpin, tetapi juga pada strategi komunikasi yang digunakan untuk membentuk persepsi publik secara efektif.

Relawan politik memainkan peran penting dalam membangun dan menyebarkan citra kandidat. Relawan tidak hanya bertindak sebagai pendukung, tetapi juga sebagai agen komunikasi yang mendistribusikan narasi politik kandidat melalui berbagai platform, termasuk media sosial, pertemuan komunitas, dan kampanye berbasis jaringan sosial (Moffitt, 2016, hlm. 97). Dengan strategi pencitraan yang efektif, seorang kandidat dapat memengaruhi opini publik, meningkatkan elektabilitas, dan memperkuat loyalitas pemilih, yang pada akhirnya berkontribusi pada kesuksesan dalam pemilu.

2.2 Teori Partisipasi Politik

Demokrasi partisipatoris menekankan peran aktif masyarakat dalam politik sebagai subjek yang memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam proses politik, bukan sekadar objek yang hanya menerima kebijakan yang dibuat oleh elite politik. Demokrasi partisipatoris bertolak dari pemikiran bahwa demokrasi tidak hanya tentang pemilu dan representasi, tetapi juga tentang keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan publik (Barber, 2003 hlm.70). Dalam konteks Pilkada Sulawesi Selatan 2024, keberadaan relawan politik mencerminkan esensi dari demokrasi partisipatoris, di mana masyarakat secara sukarela terlibat dalam proses pemilihan kepala daerah tanpa harus terafiliasi dengan partai politik secara formal.

Partisipasi masyarakat dalam bentuk gerakan relawan menunjukkan bahwa demokrasi elektoral di Indonesia telah berkembang ke arah yang lebih partisipatif. Sebagaimana dikemukakan oleh negara (Verba, Schlozman, & Brady, 1995, hlm. 271). partisipasi politik tidak hanya terbatas pada memberikan suara dalam pemilu, tetapi juga mencakup keterlibatan dalam kampanye, advokasi kebijakan, serta pembentukan opini publik. Dalam Pilkada Sulawesi Selatan 2024, relawan politik berperan dalam menyebarkan informasi, memobilisasi dukungan, serta mengorganisir kegiatan politik yang mendukung pasangan calon tertentu. Relawan ini tidak hanya bertindak sebagai agen mobilisasi, tetapi juga sebagai kanal yang menjembatani aspirasi masyarakat dengan kandidat yang mereka dukung.

Lebih lanjut, konsep demokrasi partisipatoris juga menekankan bahwa keterlibatan politik harus didasarkan pada kesadaran dan inisiatif masyarakat, bukan hanya karena pengaruh elite atau kepentingan ekonomi semata (Barber, 1984, hal.149). Dalam konteks ini, keberadaan relawan politik dapat dilihat sebagai perwujudan dari kesadaran politik yang meningkat di kalangan masyarakat, terutama dalam hal memilih pemimpin yang dianggap mampu membawa perubahan positif. Dengan kata lain, Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk mengeksplorasi bagaimana relawan berfungsi sebagai agen demokrasi yang berkontribusi terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam politik.

Diskursus partisipasi politik dapat ditelusuri dari berbagai pemikir, seperti Alexis de Tocqueville, yang memuji semangat “associational life” di

Amerika Serikat abad ke-19 sebagai fondasi keberhasilan demokrasi (de Tocqueville, 1835/1969: 87). Ia menekankan bahwa kebebasan berserikat dan berorganisasi mendorong masyarakat untuk turut serta dalam urusan publik. Pada era selanjutnya, John Stuart Mill (1861/1991: 45) memandang partisipasi politik sebagai sarana mendidik publik, sehingga manusia tidak semata dikuasai oligarki atau aristokrasi.

Memasuki abad ke-20, teori partisipasi politik bergerak ke arah kuantitatif dan empiris, didorong oleh perkembangan metode survei. Para peneliti ingin mengetahui siapa saja yang aktif, mengapa sebagian kelompok lebih aktif, serta bagaimana aktivitas politik memengaruhi hasil kebijakan (Verba & Nie, 1972: 24). Di sinilah dimensi sosiologis dan psikologis mulai diintegrasikan, misalnya studi tentang pengaruh tingkat pendidikan, status ekonomi, atau keanggotaan kelompok sosial terhadap minat politik seseorang (Verba et al., 1995: 274). Pateman (1970: 51) selanjutnya menambahkan sisi normatif bahwa partisipasi bukan hanya hak, tetapi juga tanggung jawab moral warga negara untuk mengelola pemerintahan yang representatif.

Perkembangan teknologi komunikasi dan pergeseran budaya politik menambah kerumitan studi partisipasi politik. Beberapa dekade terakhir, muncul konsep “partisipasi digital” (Norris, 2020: 42), di mana masyarakat tidak hanya hadir di TPS, tetapi juga berpartisipasi lewat internet, menandatangani petisi online, mengikuti diskusi virtual, dan membentuk komunitas daring yang berpengaruh pada opini publik. Transformasi ini

memunculkan variasi baru partisipasi, termasuk relawan virtual yang mendukung kampanye politik dan menyebarkan informasi melalui media sosial. Partisipasi pun menjadi semakin terdistribusi, tak lagi tergantung tatap muka saja.

2.2.1 Partisipasi Politik Otonom

Partisipasi politik otonom menekankan keterlibatan individu dalam aktivitas politik yang didorong oleh kesadaran dan inisiatif pribadi, tanpa adanya paksaan atau mobilisasi dari pihak lain. Partisipasi ini mencerminkan tingkat kesadaran politik dan kemandirian yang tinggi di antara warga negara, di mana individu secara aktif memilih untuk terlibat dalam proses politik tanpa intervensi eksternal (Huntington & Nelson, 1976, hlm. 202).

Menurut Huntington & Nelson (1976, hlm. 212), partisipasi otonom terjadi ketika individu secara mandiri memilih untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik, seperti memberikan suara, berpartisipasi dalam diskusi politik, atau terlibat dalam kampanye, tanpa adanya pengaruh atau mobilisasi dari elite politik atau aktor eksternal lainnya. Partisipasi ini sering kali ditemukan dalam masyarakat dengan tingkat literasi politik yang tinggi, di mana individu memiliki kesadaran akan hak dan tanggung jawab mereka dalam sistem demokrasi.

Sejalan dengan itu, Budiardjo (2008, hlm. 367) mendefinisikan partisipasi otonom sebagai keterlibatan seseorang atau sekelompok orang

secara aktif dalam kehidupan politik, baik melalui pemilihan pemimpin negara maupun dalam upaya memengaruhi kebijakan pemerintah secara langsung atau tidak langsung. Pendekatan ini berakar pada kesadaran politik individu, yang bertindak berdasarkan keyakinan dan pemahamannya terhadap situasi politik tanpa adanya paksaan atau tekanan eksternal (Verba, Schlozman, & Brady, 1995, hlm. 271).

Partisipasi politik otonom juga memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas demokrasi. Menurut Dalton (2017, hlm. 83), semakin banyak individu yang berpartisipasi secara mandiri dalam politik, semakin kuat sistem demokrasi suatu negara, karena mereka mampu mengawal kebijakan publik secara kritis dan aktif, tanpa bergantung pada mobilisasi dari elite politik. Bennett (2012, hlm. 742) juga menekankan bahwa perkembangan media digital telah meningkatkan partisipasi politik otonom, memungkinkan individu untuk berkontribusi dalam diskusi publik, menyebarkan informasi politik, serta mengorganisir gerakan sosial tanpa harus bergabung dengan institusi politik formal.

Menguatnya gerakan-gerakan relawan politik semakin terlihat dalam keterlibatannya mendukung kandidat tertentu tanpa keterikatan langsung dengan partai politik. Relawan ini sering kali menggunakan strategi mobilisasi berbasis komunitas dan media sosial, memungkinkan mereka untuk menggerakkan dukungan secara independen dan memperluas pengaruh politik di luar struktur formal partai (Savirani, 2015, hlm. 56). Hal ini menunjukkan bahwa relawan politik dapat menjadi manifestasi nyata dari

partisipasi otonom, di mana individu secara sadar mengambil peran dalam dinamika politik tanpa adanya paksaan dari pihak eksternal.

Penggerak partisipasi relawan dapat dibagi ke dalam faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi karakter individu, seperti tingkat pendidikan, keyakinan ideologis, minat pada isu tertentu, dan rasa tanggung jawab sosial. Bagi sebagian orang, menjadi relawan kampanye dianggap selaras dengan nilai pribadi, sehingga bergabung memberi kepuasan moral (Verba et al., 1995: 280). Bagi yang lain, ada pula unsur kepentingan personal, misalnya mencari jejaring atau potensi karier politik di masa depan. Meski tampak oportunistik, ini masih masuk ranah partisipasi, asalkan individu berkontribusi nyata di lapangan (Dalton, 2017: 90). Sedangkan, faktor eksternal ini mencakup kondisi politik setempat, pembukaan ruang partisipasi oleh tim kampanye, atau adanya isu kritis yang memicu semangat gerakan. Ketika pemilih dihadapkan pada kandidat yang dinilai merepresentasikan “perubahan,” gelombang antusiasme untuk menjadi relawan biasanya meningkat (Norris, 2020: 54).

2.2.2 Partisipasi Mobilisasi Politik

Selain Pendekatan demokrasi partisipatoris, Pendekatan mobilisasi politik juga relevan dalam menganalisis fenomena relawan dalam Pilkada Sulawesi Selatan 2024. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana aktor politik baik individu maupun kelompok menggunakan berbagai strategi untuk menggerakkan masyarakat agar terlibat dalam aktivitas politik (Tarrow, 1996, hlm.874) Mobilisasi politik merupakan elemen kunci dalam

kampanye pemilu, di mana kandidat dan tim sukses mereka menggunakan berbagai metode untuk menarik dukungan sebanyak mungkin.

Menurut teori mobilisasi politik, keberhasilan suatu gerakan politik bergantung pada tiga faktor utama: (1) sumber daya yang tersedia, (2) strategi yang digunakan, dan (3) struktur peluang politik yang ada. Dalam konteks relawan politik, sumber daya yang dimaksud dapat berupa jejaring sosial, dukungan logistik, serta kemampuan untuk memanfaatkan media digital sebagai alat kampanye. Strategi yang digunakan meliputi pendekatan tatap muka, penggunaan media sosial, serta pengorganisasian kegiatan berbasis komunitas untuk meningkatkan keterlibatan pemilih. Akses ke media sosial turut mempercepat mobilisasi, karena calon relawan dapat dengan mudah mendapatkan informasi pendaftaran, jadwal pelatihan, atau kegiatan kampanye. Semakin mudah saluran partisipasi, semakin tinggi kemungkinan orang bergabung (Verba & Nie, 1972: 26)

Dalam Pilkada Indonesia, fenomena relawan sering dipicu oleh faktor kultural, seperti identitas kedaerahan. Apabila seorang kandidat menonjolkan asal daerah tertentu, maka warga di sana merasa bangga dan terpanggil menjadi relawan (Han, 2014: 58). Namun, kesadaran ini tidak selalu murni. Kadang, ada campur tangan aktor berpengaruh tokoh adat, pemuka agama, atau pengusaha yang memanfaatkan jejaringnya untuk membentuk basis relawan. Dalam teori partisipasi politik, bentuk intervensi elite ini disebut “mobilisasi terarah” (guided mobilization), di mana partisipasi seolah-olah otonom, padahal terkondisikan oleh figur patron

(Dalton, 2017: 92). Pada praktiknya, membedakan mobilisasi murni dan mobilisasi patron-klien tidak selalu mudah, terlebih di tingkat lokal.

Relawan politik sering kali menggunakan pendekatan mobilisasi berbasis emosi, di mana mereka membangun ikatan emosional antara kandidat dan pemilih melalui narasi yang mengedepankan nilai-nilai seperti kejujuran, kepemimpinan yang bersih, serta visi yang berpihak kepada rakyat (Norris, 2002, hlm. 188). Dengan demikian, Pendekatan mobilisasi politik dapat membantu menjelaskan bagaimana relawan membentuk dan mempertahankan loyalitas pemilih terhadap pasangan calon tertentu (Goodwin, Jasper, & Polletta, 2001, hlm. 15).

Selain itu, Pendekatan ini juga dapat digunakan untuk menganalisis dampak dari mobilisasi politik yang dilakukan oleh relawan terhadap hasil pemilu. Beberapa kasus, strategi mobilisasi yang efektif dapat meningkatkan tingkat partisipasi pemilih serta memperkuat posisi kandidat dalam kompetisi politik. Sebagai contoh, penggunaan media sosial sebagai alat mobilisasi telah terbukti mampu meningkatkan partisipasi politik masyarakat, terutama di kalangan pemilih muda (Bennett & Segerberg, 2012, hlm. 742). Oleh karena itu, penelitian ini dapat mengeksplorasi bagaimana penggunaan teknologi informasi oleh relawan dapat mempercepat dan memperluas jangkauan mobilisasi politik dalam Pilkada Sulawesi Selatan 2024.

2.2.3. Dimensi-Dimensi Partisipasi Politik

Peneliti sering menggolongkan partisipasi politik ke dalam beragam bentuk, dari yang paling minimal hingga paling intens. Verba, Schlozman, dan Brady (1995: 277) misalnya mengategorikannya menjadi empat:

1. Memberikan Suara (Voting)

Bentuk paling umum dan paling minimal. Di kebanyakan negara demokrasi, hak pilih menjadi gerbang awal untuk menilai apakah seseorang “ikut berpartisipasi.” Meski demikian, voting tidak sepenuhnya mencerminkan partisipasi aktif, sebab boleh jadi pemilih hanya menjalankan kewajiban sekali lima tahun tanpa terlibat lebih lanjut.

2. Kampanye dan Organisasi

Meliputi aktivitas menjadi anggota partai, bergabung dalam relawan kampanye, menyumbang dana politik, dan ikut mobilisasi massa. Partisipasi ini memerlukan lebih banyak sumber daya dan waktu, serta motivasi yang lebih kuat.

3. Kontak Personal dengan Pejabat Publik

Warga yang mengirim surat atau mendatangi kantor pejabat untuk mengadukan masalah tertentu sudah menunjukkan partisipasi tingkat lanjut. Langkah ini menuntut keberanian mengekspresikan kepentingan secara langsung.

4. Keterlibatan dalam Gerakan Sosial

Aksi protes, demonstrasi, boikot, dan gerakan akar rumput (*grassroots*) termasuk dalam bentuk partisipasi yang bersifat kolektif, sering dipicu oleh ketidakpuasan serius terhadap kebijakan. Di era digital, gerakan ini kerap diorganisir melalui jejaring online yang lintas regional atau bahkan global.

Pateman (1970: 52) juga menambahkan bahwa partisipasi politik tidak boleh terhenti ketika pemilu usai. Idealnya, warga senantiasa terlibat mengawasi dan memberi masukan terhadap kebijakan pemerintah. Di sini, lembaga-lembaga partisipatif seperti musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di Indonesia atau civic forum di beberapa negara Eropa menjadi contoh institusionalisasi partisipasi lebih berkesinambungan.

Keberadaan relawan politik dapat dibaca sebagai salah satu manifestasi partisipasi politik dalam wujud kampanye dan organisasi (Verba et al., 1995: 278). Relawan tidak sekadar memilih pada hari pemilihan, melainkan bergabung dalam tim kampanye secara sukarela untuk memengaruhi keputusan pemilih lain. Dari perspektif teori partisipasi, relawan adalah partisipan aktif yang umumnya memiliki motivasi tinggi—baik didorong idealisme, kesamaan isu, atau kedekatan emosional pada figur kandidat. Partisipasi relawan kerap melibatkan intensitas keterlibatan yang lebih besar, seperti melakukan kunjungan door-to-door, memfasilitasi diskusi komunitas, serta menyiapkan logistik kampanye. Han (2014: 55) menyebutnya sebagai “*civic voluntarism*,” di mana individu menyalurkan

sumber daya (waktu, energi, pengetahuan) untuk tujuan politik yang lebih besar daripada kepentingan personal semata.

Teori partisipasi politik menyoroti dua prasyarat utama yang memungkinkan seseorang menjadi relawan: (1) Keyakinan bahwa keterlibatan akan berdampak, dan (2) Ketersediaan sumber daya. Dalam hal dampak, orang yang percaya bahwa tindakannya dapat benar-benar memengaruhi hasil pemilihan atau kualitas pemimpin lebih terdorong untuk meluangkan waktu bagi kegiatan kerelawanan (Verba et al., 1995: 279). Dari sisi sumber daya, mereka yang memiliki keluangan waktu, jejaring sosial, dan pengetahuan politik sering kali muncul sebagai relawan aktif. Peran literasi politik pun tak kalah penting: individu yang paham mekanisme pemilu dan urgensi kebijakan biasanya lebih berminat bergabung, karena meyakini kerja relawan bisa membantu pencerahan di masyarakat (Dalton, 2017: 83).

Pateman (1970: 56) mengaitkan partisipasi politik dengan pelembagaan demokrasi yang bersifat "partisipatoris." Dalam sistem semacam ini, relawan politik cenderung tidak hanya muncul di masa kampanye, tetapi juga di periode antara pemilu. Mereka mengorganisir diskusi kebijakan, mendirikan forum advokasi, dan mengawasi kinerja pejabat terpilih. Akan tetapi, realitas menunjukkan bahwa di banyak tempat, relawan lebih aktif di masa kampanye saja, lantas perlahan "menguap" setelah pemilu. Fenomena ini menunjukkan adanya "participation gap," yakni celah antara potensi partisipasi dengan keberlanjutan kegiatan politik (Dalton, 2017: 86).

Dalam konteks teori partisipasi politik, gerakan relawan mampu mengubah wajah kompetisi elektoral. Terutama di masyarakat yang partainya tidak lagi begitu kuat, relawan menjadi saluran baru keterlibatan, memfasilitasi warga yang ingin berpolitik tanpa harus menjadi anggota partai (Norris, 2020: 42). Tipe partisipasi ini kadang disebut partisipasi “post-partisan,” menggambarkan kecenderungan warga mencari jalur independen untuk menyalurkan dukungan politik. Dengan demikian, teori partisipasi politik memberi kerangka yang menjelaskan mengapa relawan tumbuh subur: baik karena kelemahan partai sebagai kanal konvensional, atau karena tersedianya insentif psikologis dan moral untuk bergabung dengan gerakan kolektif pendukung kandidat.

Pendekatan teori partisipasi politik sekaligus membuka ruang pemahaman bahwa keterlibatan warga dalam pemilu tidaklah monolitik. Seseorang bisa saja hanya memilih sekali lima tahun, sementara yang lain bergabung sebagai relawan dan secara aktif memengaruhi opini publik. Fenomena relawan politik dalam pilkada atau pemilu mencerminkan partisipasi tingkat menengah hingga tinggi, di mana warga tidak sekadar menggunakan hak suara, tetapi turut menjadi penggerak. Relawan pun memiliki banyak rupa mulai dari motivasi idealis memperbaiki daerah, hingga kepentingan pragmatis memburu proyek atau posisi. Namun, apapun alasannya, keberadaan relawan menegaskan bahwa partisipasi politik masyarakat bukanlah keniscayaan statis. Ia bisa dirangsang, dikelola, bahkan dialihkan.

Pendekatan ini mengingatkan pentingnya demokrasi partisipatoris, yang tidak cukup dengan partai politik semata, melainkan memerlukan inisiatif warga di luar lembaga formal. Relawan politik dalam konteks ini berpeluang menjadi inovasi sosial, tempat orang-orang menyalurkan aspirasi tanpa terikat aturan ketat partai. Dalam beberapa kasus, kehadiran relawan menumbuhkan pemahaman publik yang lebih kaya terhadap isu kampanye. Namun, sebagaimana teori partisipasi politik menekankan, tanpa jaminan kebebasan berpolitik dan tanpa infrastruktur yang memadai (akses informasi, perlindungan hukum, dll.), partisipasi tersebut bisa terdistorsi.

Maka, penelitian relawan politik dalam kerangka teori partisipasi politik memungkinkan analisis yang lebih mendalam mengenai peran relawan dalam memfasilitasi keterlibatan warga, termasuk di kalangan pemilih yang sebelumnya cenderung apatis. Melalui perspektif ini, penelitian dapat menilai sejauh mana aktivitas relawan berkontribusi terhadap penguatan *civic engagement* yang tidak hanya bersifat sesaat selama masa kampanye, tetapi juga berpotensi berlanjut setelah pemilu berlangsung. Selain itu, teori partisipasi politik membantu menjelaskan pola interaksi antara relawan dan tim kampanye formal, serta implikasinya terhadap kualitas proses pemilu, khususnya dalam aspek mobilisasi, inklusivitas, dan konsistensi partisipasi pemilih.

Analisis tersebut memperkaya pemahaman mengenai dinamika demokrasi lokal dengan menunjukkan bagaimana gerakan relawan berperan dalam menerjemahkan prinsip partisipasi politik ke dalam praktik

nyata. Dengan demikian, teori partisipasi politik menjadi pijakan konseptual yang penting untuk menelaah dinamika relawan secara komprehensif, terutama ketika dikaitkan dengan teori strategi politik yang menjelaskan dimensi perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan kampanye secara keseluruhan.

2.3. Teori Pertukaran

Untuk menjelaskan teori pertukaran, pada kerangka teoritik ini akan diuraikan lima sub bahasan. Pertama, konsep dasar pertukaran sosial; kedua, teori pertukaran sosial Blau; ketiga, teori Pertukaran Kepentingan Homans; keempat, *symbolic Capital*; kelima, *Bounded Rationality* dalam Pertukaran. Kelima sub bahasan tersebut diuraikan sebagai berikut.

2.3.1 Konsep Dasar Pertukaran Sosial

Teori pertukaran sosial (*social exchange theory*) memberikan kerangka analitis untuk memahami relasi sosial dan organisasi sebagai arena pertukaran kepentingan yang melibatkan kontribusi, imbalan, dan ekspektasi timbal balik, baik yang bersifat material maupun non-material. Dalam perspektif ini, keterlibatan individu dalam organisasi atau aktivitas kolektif tidak dipahami sebagai tindakan altruistik semata, melainkan sebagai proses rasional dan relasional yang dipandu oleh pertimbangan manfaat, biaya, serta makna sosial dan politik dari keterlibatan tersebut.

2.3.2 Teori Pertukaran Sosial Blau

Untuk menjelaskan teori pertukaran, pada kerangka teoritik ini digunakan Teori dari Peter M. Blau. Blau menerima prinsip pertukaran sosial dari B.F Skinner dan George C. Homans. Bagi Blau fenomena daya Tarik individu akan ganjaran sosial merupakan sesuatu yang bersifat “given” dan merupakan asal usul struktur sosial. Yang menarik individu ke dalam asosiasi karena mengharapkan ganjaran intrinsik dan ekstrinsik. Ganjaran ekstrinsik dapat berupa uang, barang-barang atau jasa-jasa, sedang ganjaran intrinsik dapat berupa kasih sayang, pujian, kehormatan dan kecantikan.

Ada dua persyaratan yang harus dipenuhi perilaku yang menjurus pada pertukaran sosial. Persyaratan tersebut adalah :

1. Perilaku harus berorientasi pada tujuan-tujuan yang hanya dapat dicapai melalui interaksi dengan orang lain.
2. Perilaku harus bertujuan untuk memperoleh sarana bagi pencapaian tujuan-tujuan tersebut.

Pokok teori Blau adalah mengenai perubahan dalam proses sosial yang beralih dari struktur sosial yang sederhana ke struktur sosial yang lebih kompleks. Kebimbangan ini boleh dilihat dalam pembangunan sistem stratifikasi dalam kumpulan yang lebih kompleks. Pada peringkat awal pembentukan kumpulan, individu cuba menunjukkan nilai mereka kepada kumpulan. Anggota akan memberikan nilai yang berbeza sehingga terdapat

perbezaan status. Tidak semua orang mampu atau bersedia memikul tanggungjawab kepimpinan kumpulan.

Akibatnya, sebahagian dari mereka akan turun dan memberi peluang kepada orang lain untuk mendapatkan kedudukan. Sebagai wujud dari hirarki dari suatu kedudukan dapat meningkatkan tahap kebutuhan dan kepentingan untuk integrasi sosial dengan status yang berbeda. terdapat hubungan pertukaran yang berkaitan dengan masalah stratifikasi. Pertukaran berlaku apabila hubungan itu disukai oleh anggota hirarki tinggi atau rendah. Namun, sekiranya berlaku hubungan bersifat paksaan hubungan pertukaran yang tidak seimbang dan dikekalkan melalui sekatan negatif. Kekuatan seperti itu penuh dengan masalah kerana dapat menimbulkan perlawanan.

Untuk itu agar masyarakat berfungsi dengan baik, maka yang berada di bawah perlu mematuhi dan melaksanakan kewajiban mereka sehari-hari dengan pengarahan dari yang menduduki kekuasaan. Sangat bijaksana jika yang berkuasa sebanyak mungkin memperendah potensi penggunaan daya paksa tersebut. Blau juga menggambarkan "*the emergence principle*" yaitu adanya nilai-nilai dan norma-norma yang disetujui secara bersama dalam kelompok. Nilai-nilai social yang diterima bersama berfungsi sebagai media transaksi sosial bagi organisasi serta kelompok-kelompok sosial. Blau percaya bahwa kompleksitas pola-pola kehidupan sosial dapat dijumpai oleh nilai-nilai bersama yang melembaga. Nilai-nilai yang telah terlembaga akan bertahan bila memenuhi tiga syarat, yaitu (Poloma, 2000 : 92) :

1. Prinsip-prinsip yang diorganisir harus merupakan bagian dari prosedur prosedur yang diformalisir (konstitusi atau dokumen lainnya) sehingga setiap saat bebas dari orang yang melaksanakannya.
2. Nilai-nilai sosial yang mengesahkan bentuk institusional harus diwariskan kepada generasi selanjutnya melalui proses sosialisasi.
3. Kelompok-kelompok dominan dalam masyarakat harus menganut nilai-nilai itu serta harus meminjamkan kekuasaannya untuk mendukung lembaga-lembaga yang memasyarakatkan nilai-nilai tersebut.

2.3.2.1 Nilai-nilai, Norma-norma, dan Kepentingan dalam Pertukaran Sosial

Anomali mengenai bagaimana terjadinya pertukaran sosial, Alvin Gouldner menyatakan bahwa norma hubungan timbal balik ini bukan hanya bersifat mempertahankan atau mekanisme stabil tetapi juga mengandung suatu pengertian apa yang disebut dengan mekanisme awal, hal inilah yang menolong untuk memahami karakter interaksi sosial. Berkaitan dengan hal tersebut Blau memiliki pandangan lain yaitu bahwa mekanisme pola yang mendasar dari interaksi sosial itu haruslah ditemukan di dalam kondisi dari pertukaran dan bukan dalam norma hubungan timbal balik. Blau menekankan adanya kepentingan diri dari pada norma-norma moral,

dimana kepentingan diri itu merupakan kondisi yang diperlukan dalam pertukaran.

Adanya interest dalam sebuah pertukaran yang menjadi sesuatu yang sangat penting dari kedua pendapat tersebut namaun dari perbedaan tersebut memiliki persamaan pada konteks tibal balik dari sebuah prilaku yang akan dilakukan.

Beberapa tipe yang berbeda mengenai nilai dan norma didiskusikan: nilai-nilai yang memberikan legitimasi, nilai-nilai oposisi, nilai-nilai partikularistik, dan nilai-nilai universalistik. Dalam sistem yang besar dan kompleks seperti masyarakat keseluruhannya, nilai-nilai abstrak seperti itu menjadi lebih penting daripada penghargaan yang bersifat langsung, untuk mempertahankan pola-pola yang sudah mapan. Ini disebabkan karena banyaj dari pola-pola ini bersifat tidak langsung meskipun bayaran orang secara pribadi itu selalu penting, orang sering rela untuk membatalkan pemuasan yang langsung atas beberapa kebutuhannya demi kepentingan penyesuaian diri terhadap nilai-nilai dan norma-norma bersam, dan memperoleh dukungan sosial yang merupakan hasil dari penyesuaian diri itu. Pada umumnya dinamika-dinamika sosial yang terkandung dalam proses institusionisasi sangat penting untuk menjelaskan sistem makro yang luas ini. Sebaliknya, proses-proses ini secara relatif kurang penting dibandingkan dengan bayaran atau penghargaan yang diberikan secara pribadi pada tingkat mikro dalam pertemuan tatap muka.

Menurut Blau, beberapa orang tertarik untuk dapat membangun sebuah asosiasi antar satu pihak dengan pihak lain. Begitu awal ikatan terjalin, maka ganjaran yang mereka berikan kepada sesamanya dapat berfungsi sebagai penguat suatu ikatan atau justru juga dapat menjadikan hal itu sebagai perusak hubungan ikatan yang terjalin tersebut dikarenakan ketidakseimbangan ganjaran antara satu pihak dengan pihak yang lain. Dan lebih jauhnya, tidak hanya memperlemah dan menghancurkan hubungan tersebut, namun juga akan menimbulkan eksploitasi kekuasaan. Ganjaran yang dimaksud diatas adalah sebuah hal yang bisa berupa intrinsik, seperti kasih, sayang, afeksi dan yang lainnya. Dan juga dapat berupa hal yang bersifat ekstrinsik seperti uang, barang, dan bahan material lainnya. Karena setiap kelompok tidak dapat memberikan ganjaran yang sama/seimbang. Maka disitulah kepentingan kekuasaan terjadi.

2.3.2.2 Kekuasaan dan Diferensiasinya

Kekuasaan yang dimaksudkan dalam hal ini merupakan kemampuan untuk menekan kepatuhan terhadap perilaku *negative*. Kekuasaan itu merupakan suatu hal yang secara inheren bersifat hubungan sepihak yang terletak pada jaringan kemampuan seseorang untuk mempertahankan ganjaran dan menggunakan hukuman terhadap yang lain. Sumber kekuasaan bersifat ketergantungan yang sepihak. Sebab saling ketergantungan dan saling memiliki pengaruh terhadap kekuatan yang sama menunjukkan adanya kelemahan kekuasaan tersebut mencoba untuk

mendominasi dengan mereka yang mencari kebebasan konflik kepentingan yang ada di dalam masyarakat secara umum memiliki suatu asumsi bentuk-bentuk ideologis, ekonomi, politik, dan hukum.

Blau (dalam Zaifullah, 2021: 44) memberikan batasan kekuasaan sesuai dengan pengertian Weberian, yaitu *“kemampuan orang atau kelompok memaksakan kehendaknya pada pihak lain, walaupun terdapat penolakan melalui perlawanan, baik dalam bentuk pengurangan pemberian ganjaran secara teratur maupun dalam bentuk penghukuman, sejauh kedua hal itu ada, dengan memperlakukan sanksi negatif”...*

Untuk menjelaskan hubungan-hubungan ketergantungan-kekuasaan (*power-dependence*), Blau mengutip skema Richard Emerson sebagai dasara untuk menganalisa ketimpangan kekuasaan yang terdapat di dalam dan di antara kelompok-kelompok. Individu yang membutuhkan pelayanan orang lain harus memberikan alternatif berikut ini :

1. Ia dapat memperoleh pelayanan yang sama sehingga dengan demikian hubungan dengan yang lainnya masih merupakan hubungan timbal balik yang sama.
2. Ia dapat memperoleh pelayanan yang sama di mana-mana.
3. Ia dapat memaksa seseorang untuk memberikan pelayanan, hal ini merupakan hasil dari dominasinya terhadap yang lain.

4. Ia dapat bekerja tanpa mengharapkan pelayanan seperti itu atau ia menemukan beberapa penggantinya.

Jika keempat alternatif ini tidak ada, maka individu ini tidak memiliki pilihan lain kecuali ia harus tunduk, hal tersebut dikarenakan pihak yang mengontrol pelayanan yang dibutuhkan itu telah mampu membuat prasyarat untuk patuh. Adanya empat alternatif ini akan menciptakan suatu kondisi kemandirian sosial, karena dengan adanya empat alternatif tersebut maka individu-individu akan mampu menjauhi bentuk ketergantungan pelayanan yang lainnya. Yang diinginkan disini yaitu bahwa siapa yang menginginkan untuk dapat melaksanakan dan menjaga kekuasaan maka haruslah mengambil suatu strategi tertentu. Disinilah dapat timbulnya konflik kepentingan antara mereka yang mencoba untuk mendominasi dengan mereka yang mencari kebebasan konflik kepentingan yang ada di dalam masyarakat secara umum memiliki suatu asumsi bentuk-bentuk ideologis, ekonomi, politik, dan hukum.

2.3.3 Teori Pertukaran Kepentingan Homans

Homans (1958) mengembangkan teori pertukaran yang menekankan dimensi rasional dan instrumental dengan melihat individu sebagai aktor yang secara berkelanjutan menimbang ganjaran (rewards) dan biaya (costs) dalam setiap tindakan sosial. Dalam kerangka pertukaran kepentingan, individu akan mempertahankan keterlibatan dalam relasi atau organisasi selama ganjaran yang diperoleh (baik material maupun non-

material) dinilai melampaui biaya yang dikeluarkan (waktu, tenaga, risiko sosial).

Homans menekankan bahwa pertukaran sosial mengikuti prinsip distributive justice, di mana individu mengharapkan bahwa imbalan yang diterima seimbang dengan kontribusi yang diberikan. Ketidakseimbangan yang berkepanjangan dapat menyebabkan ketidakpuasan dan penarikan diri dari relasi pertukaran.

2.3.4. *Symbolic Capital* (Bourdieu)

Bourdieu (1986) mengembangkan konsep symbolic capital yang menjelaskan bahwa dalam relasi sosial, individu tidak hanya mengejar keuntungan material (economic capital), tetapi juga mengejar modal simbolik berupa pengakuan, prestise, kehormatan, dan legitimasi sosial. Modal simbolik memiliki nilai strategis karena dapat meningkatkan posisi sosial individu dalam jaringan sosial dan membuka akses terhadap sumber daya sosial maupun politik lainnya.

Bourdieu menekankan bahwa symbolic capital sering kali menjadi sumber kekuatan sosial yang lebih stabil dibanding capital material, karena berakar pada pengakuan sosial dan legitimasi kolektif. Dalam konteks relawan politik, pengakuan organisasi, posisi dalam struktur relawan, serta akses terhadap jaringan politik dapat dipahami sebagai bentuk symbolic capital yang memperkuat keterikatan relawan terhadap organisasi.

2.3.5 Bounded Rationality dalam Pertukaran

Simon (1957) mengembangkan teori *bounded rationality* yang menjelaskan bahwa dalam situasi kompleks dengan informasi terbatas dan ketidakpastian tinggi, aktor tidak membuat keputusan berdasarkan optimalisasi sempurna, melainkan berdasarkan satisficing, yaitu mencari solusi yang cukup baik (*good enough*) dalam kondisi yang ada.

Rasionalitas aktor dalam organisasi relawan tidak sepenuhnya bersifat ekonomi atau instrumental, tetapi bekerja dalam keterbatasan informasi, norma organisasi, dan relasi sosial yang mengelilingi aktor. Keputusan untuk tetap terlibat dan loyal tidak diambil dalam ruang kalkulasi bebas, melainkan dalam kerangka struktur komando, ekspektasi kolektif, serta relasi kepercayaan yang telah terbangun.

2.4. Teori Organisasi Politik

Pemahaman tentang organisasi politik berangkat dari kebutuhan untuk menjelaskan bagaimana aktor-aktor di dalamnya dapat bergerak secara terkoordinasi dalam mencapai tujuan kolektif. Dalam konteks ini, Henry Mintzberg mengembangkan teori *organizational coordination* yang menekankan bahwa organisasi yang kompleks cenderung mengandalkan mekanisme koordinasi berbasis hierarki dan pembagian kerja formal. Koordinasi tidak dibiarkan berjalan secara spontan, melainkan diatur melalui pembagian tugas yang jelas, rantai komando yang tegas, serta standarisasi proses kerja agar seluruh unit organisasi bergerak dalam arah yang sama (Mintzberg, 1979:2–5; 1983:18–21). Menurut Mintzberg, dalam

organisasi yang memiliki tujuan spesifik dan target terukur, struktur formal justru menjadi prasyarat efektivitas, karena mampu mengurangi ambiguitas peran dan konflik kewenangan. Dengan demikian, keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh kesesuaian (*fit*) antara desain struktur dan konteks operasional yang dihadapi (Mintzberg, 1979:161–164).

Struktur hierarkis dan mekanisme koordinasi tersebut kemudian bekerja secara efektif ketika didukung oleh pembagian kerja yang jelas. Dalam hal ini, Émile Durkheim melalui konsep *division of labor* menjelaskan bahwa efektivitas kerja kolektif dalam organisasi modern dicapai melalui spesialisasi fungsi. Setiap individu atau unit menjalankan peran tertentu yang saling melengkapi dalam satu sistem kerja yang terintegrasi (Durkheim, 1893/1997:70–75). Pembagian kerja tidak hanya berfungsi meningkatkan efisiensi, tetapi juga membentuk *solidaritas organik*, yakni kohesi sosial yang muncul karena saling ketergantungan antarperan dalam organisasi. Dengan kata lain, diferensiasi fungsi justru memperkuat integrasi sistem secara keseluruhan (Durkheim, 1893/1997:129–131).

Namun, pembagian kerja dan hierarki tidak serta-merta menjamin kepatuhan dan konsistensi perilaku aktor. Pada titik inilah dimensi pengawasan menjadi penting. Michel Foucault melalui konsep *panopticon effect* menjelaskan bahwa dalam organisasi modern, pengawasan tidak selalu dilakukan secara langsung atau represif. Sebaliknya, pengawasan bekerja melalui sistem pemantauan yang membuat setiap aktor menyadari bahwa kinerjanya dapat dilihat, dinilai, dan dikoreksi kapan saja (Foucault, 1977:195–201). Kesadaran akan kemungkinan diawasi ini mendorong

individu untuk mendisiplinkan diri dan menyesuaikan perilaku mereka dengan standar organisasi secara sukarela. Dengan demikian, kontrol tidak hanya bersifat eksternal, tetapi juga terinternalisasi dalam praktik kerja sehari-hari (Foucault, 1977:202–205).

Pengawasan tersebut semakin menguat ketika organisasi bergerak menuju bentuk yang lebih rasional dan birokratis. Max Weber menjelaskan bahwa organisasi modern berkembang melalui proses rasionalisasi, yaitu pergeseran dari pola kerja berbasis relasi personal menuju sistem kerja yang bertumpu pada aturan, prosedur, dan dokumentasi formal. Dalam organisasi rasional-birokratis, keputusan diambil berdasarkan informasi yang terdokumentasi dan dapat diverifikasi, bukan semata-mata atas dasar intuisi atau kedekatan personal (Weber, 1978:956–958). Pencatatan administratif dan kontrol informasi menjadi instrumen utama untuk menjaga konsistensi tindakan organisasi sekaligus menjamin akuntabilitas pelaksanaan tugas di setiap level (Weber, 1978:973–975).

Relasi struktural dan sistem kontrol tersebut dapat dipahami lebih jauh melalui perspektif *principal–agent*. Michael C. Jensen dan William H. Meckling memandang organisasi sebagai hubungan antara *principal* yang menetapkan tujuan dan *agent* yang menjalankan tugas operasional. Dalam relasi ini, selalu terdapat potensi perbedaan kepentingan dan risiko deviasi implementasi, sehingga diperlukan mekanisme kontrol berupa monitoring, evaluasi, dan sistem pelaporan yang terstruktur (Jensen & Meckling, 1976:308–310). Kerangka ini kemudian diperkaya oleh Kathleen M. Eisenhardt, yang menekankan bahwa desain insentif dan pengawasan

yang tepat menjadi kunci untuk meminimalkan *agency problem* dalam organisasi kompleks (Eisenhardt, 1989:58–60).

Meski demikian, organisasi tidak beroperasi dalam ruang yang statis. Lingkungan politik yang dinamis menuntut organisasi untuk mampu beradaptasi. James G. March dan Herbert A. Simon menjelaskan bahwa organisasi yang efektif adalah organisasi yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan eksternal dan merespons ketidakpastian melalui pembelajaran organisasi. Adaptasi dilakukan melalui penyesuaian strategi, fleksibilitas dalam pengambilan keputusan, serta kemampuan membaca peluang dan ancaman yang muncul (March & Simon, 1958:169–173). Kemampuan merespons dinamika lokal dan tekanan situasional menjadi indikator penting dari kapasitas adaptif organisasi (March & Simon, 1958:181–184).

Pada akhirnya, efektivitas organisasi tidak hanya bergantung pada struktur, pengawasan, dan adaptasi, tetapi juga pada sejauh mana kontrol organisasi telah terinternalisasi. William G. Ouchi melalui konsep *internalized control* menjelaskan bahwa kontrol akan bekerja paling efisien ketika nilai, norma, dan tujuan organisasi diadopsi oleh anggota sebagai pedoman perilaku. Dalam kondisi ini, kepatuhan tidak lagi bergantung pada pengawasan ketat atau sanksi formal, melainkan pada penerimaan terhadap legitimasi struktur komando dan tujuan kolektif organisasi (Ouchi, 1979:838–840). Loyalitas dan komitmen menjadi mekanisme kontrol yang kuat karena bekerja melalui kepercayaan dan rasa tanggung jawab

bersama, sehingga memungkinkan organisasi tetap solid bahkan dalam situasi tekanan dan keterbatasan sumber daya (Ouchi, 1979:841–843).

2.5. Teori Perilaku Pemilih (*Voting Behavior*)

Kajian perilaku memilih modern banyak berangkat dari Survey Research Center University of Michigan, khususnya melalui model yang dikembangkan oleh Angus Campbell bersama koleganya. Dalam *Michigan Model*, perilaku memilih dipahami sebagai hasil interaksi antara tiga orientasi psikologis utama, yakni identifikasi partai (*party identification*), orientasi terhadap isu (*issue orientation*), dan evaluasi terhadap kandidat (*candidate evaluation*) (Campbell et al., 1960:16–20). Model ini menekankan bahwa identifikasi partai atau figur kandidat yang kuat berfungsi sebagai jangkar psikologis yang membentuk persepsi pemilih terhadap isu dan kontestasi politik. Karena itu, pemilih dengan keterikatan afektif yang mapan cenderung menunjukkan perilaku memilih yang stabil dan konsisten lintas waktu pemilu (Campbell et al., 1960:121–126).

Namun, Michigan Model tidak sepenuhnya menjelaskan dinamika pemilih yang bersifat pragmatis dan situasional, terutama dalam konteks kompetisi politik yang cair. Pada titik inilah pendekatan *rational choice* memberikan perspektif pelengkap. Anthony Downs melalui *An Economic Theory of Democracy* memandang pemilih sebagai aktor rasional yang membuat keputusan berdasarkan kalkulasi untung–rugi. Pemilih membandingkan manfaat yang diharapkan dari suatu pilihan politik dengan biaya yang harus ditanggung, termasuk risiko konflik sosial, tekanan lingkungan, maupun ketidakpastian realisasi janji politik (Downs, 1957:36–

40). Dalam kerangka ini, pilihan politik tidak selalu ditentukan oleh loyalitas jangka panjang, melainkan oleh evaluasi rasional terhadap situasi politik yang sedang dihadapi (Downs, 1957:96–101).

Meski demikian, baik Michigan Model maupun *rational choice theory* cenderung menempatkan pemilih sebagai unit analisis individual. Pendekatan ini dilengkapi oleh perspektif sosiologis yang menekankan bahwa keputusan politik tidak pernah sepenuhnya terlepas dari struktur sosial. Seymour Martin Lipset dan Stein Rokkan menjelaskan bahwa perilaku memilih tertanam dalam konfigurasi sosial seperti kelas, agama, etnis, dan wilayah geografis. Afiliasi kelompok dan norma komunitas membentuk preferensi politik secara laten dan berjangka panjang, sehingga pilihan pemilih sering kali merefleksikan loyalitas sosial daripada kalkulasi individual semata (Lipset & Rokkan, 1967:3–10). Dengan demikian, perilaku memilih dipahami sebagai produk interaksi antara individu dan struktur sosial yang melingkupinya (Lipset & Rokkan, 1967:34–38).

Perbedaan karakter pemilih yang dijelaskan oleh pendekatan psikologis, rasional, dan sosiologis tersebut kemudian memiliki implikasi langsung terhadap strategi organisasi politik. Dalam konteks ini, *contingency theory* memberikan kerangka untuk memahami bagaimana organisasi menyesuaikan diri dengan keragaman lingkungan pemilih. Paul R. Lawrence dan Jay W. Lorsch menegaskan bahwa tidak ada satu desain organisasi yang paling ideal untuk semua situasi; efektivitas struktur sangat bergantung pada tingkat kompleksitas dan ketidakpastian lingkungan (Lawrence & Lorsch, 1967:10–14). Pandangan ini kemudian diperkuat oleh

Lex Donaldson, yang menyatakan bahwa organisasi yang beroperasi dalam lingkungan heterogen baik secara sosial maupun geografis cenderung mengembangkan struktur yang lebih terdiferensiasi untuk menjaga efektivitas koordinasi dan pengendalian (Donaldson, 2001:7–12).

Dengan demikian, Michigan Model dan pendekatan-pendekatan pelengkapannya menunjukkan bahwa perilaku pemilih tidak dapat dipahami secara tunggal. Preferensi pemilih dibentuk oleh kombinasi orientasi psikologis, kalkulasi rasional, dan keterikatan sosial, sementara strategi organisasi politik harus disusun secara kontingensial untuk merespons keragaman tersebut. Kerangka ini menjadi penting dalam menganalisis bagaimana organisasi atau relawan politik menyesuaikan pola mobilisasi dan komunikasi mereka dengan karakter pemilih di tingkat lokal.

2.6. Teori Jaringan Sosial (*Social Network Theory*)

Pemahaman tentang keberlanjutan dan efektivitas gerakan sosial maupun politik tidak dapat dilepaskan dari analisis jaringan relasi antaraktor. Dalam kerangka ini, Mark Granovetter melalui artikelnya yang klasik membedakan antara *strong ties* dan *weak ties* untuk menjelaskan daya tahan hubungan sosial. Ikatan kuat (*strong ties*) terbentuk melalui interaksi yang intensif, pengalaman kolektif yang berulang, serta tingkat kepercayaan yang tinggi, sehingga hubungan semacam ini cenderung stabil dan bertahan dalam jangka panjang (Granovetter, 1973:1361–1363). Sebaliknya, ikatan lemah (*weak ties*) bersifat lebih instrumental dan temporer, umumnya dibangun untuk tujuan tertentu dan mudah terurai ketika struktur formal, insentif, atau tujuan bersama tidak lagi diaktifkan

(Granovetter, 1973:1365–1367). Perbedaan ini menjadi dasar untuk memahami mengapa sebagian jaringan sosial mampu bertahan melampaui momentum tertentu, sementara yang lain cepat mengalami disintegrasi.

Keberlanjutan jaringan tersebut tidak hanya ditentukan oleh kekuatan ikatan, tetapi juga oleh struktur internal jaringan dan peran aktor-aktor kunci di dalamnya. Stephen P. Borgatti dan Daniel S. Halgin mengembangkan konsep *network persistence* yang menekankan pentingnya keberadaan simpul kunci (*key nodes*) dalam menjaga aliran informasi dan konektivitas jaringan. Aktor-aktor inti seperti koordinator atau relawan penghubung berfungsi sebagai penjaga stabilitas jaringan dengan menghubungkan berbagai kluster relasi yang ada (Borgatti & Halgin, 2011:1169–1172). Bahkan ketika struktur formal organisasi melemah atau tidak lagi aktif, keberadaan simpul-simpul ini memungkinkan jaringan tetap hidup dalam bentuk yang lebih cair dan fleksibel (Borgatti & Halgin, 2011:1176–1178).

Namun, peran simpul kunci tersebut hanya efektif apabila jaringan memiliki akar sosial yang kuat di tingkat lokal. Dalam konteks ini, Mark Granovetter melalui teori *embeddedness* menegaskan bahwa tindakan organisasi, termasuk mobilisasi politik, tidak pernah berdiri sendiri secara otonom. Sebaliknya, tindakan tersebut selalu tertanam (*embedded*) dalam jaringan relasi sosial, norma lokal, serta kepercayaan komunitas tempat aktor beroperasi (Granovetter, 1985:481–483). Aktor lapangan yang memiliki posisi strategis dalam jaringan sosial lokal—misalnya karena hubungan kekerabatan, kedekatan komunitas, atau legitimasi sosial—cenderung lebih efektif dalam menggerakkan partisipasi dibanding aktor

yang hanya mengandalkan otoritas struktural formal (Granovetter, 1985:487–490). Dengan demikian, kekuatan jaringan bukan semata-mata ditentukan oleh desain organisasi, tetapi oleh kedalaman keterlekatan sosial para aktornya.

Meski demikian, teori jaringan sosial juga menekankan bahwa tidak ada jaringan yang sepenuhnya kebal terhadap pelapukan. Tanpa tujuan kolektif baru, agenda bersama yang diperbarui, atau insentif yang mampu menjaga relevansi hubungan, jaringan cenderung mengalami penurunan kepadatan dan intensitas interaksi, suatu proses yang dikenal sebagai *network decay*. Ketika momentum yang menyatukan jaringan—seperti kontestasi elektoral—berakhir, ikatan lemah biasanya menjadi yang pertama terurai, diikuti oleh melemahnya koneksi antaraktor perifer. Keberlanjutan jaringan, karena itu, bersifat kontingen dan sangat bergantung pada kemampuan jaringan untuk memproduksi makna baru, memperbarui fungsi relasional, serta menemukan relevansi sosial di luar tujuan awal pembentukannya (Granovetter, 1973:1370–1372; Borgatti & Halgin, 2011:1180–1182).

2.7. Teori Kampanye Politik Modern

Perkembangan kampanye politik kontemporer menunjukkan pergeseran mendasar dari pola kampanye massal yang bersifat sporadis menuju kampanye yang terorganisasi, tersegmentasi, dan dikelola secara profesional. David M. Farrell dan Rüdiger Schmitt-Beck menjelaskan bahwa modern campaign organization ditandai oleh penggunaan struktur kerja berjenjang, pembagian tugas yang spesifik, serta perencanaan

kampanye yang berbasis riset pemilih dan target elektoral yang terukur (Farrell & Schmitt-Beck, 2002:7–10). Pandangan ini kemudian diperkuat oleh Rachel Gibson, yang menegaskan bahwa profesionalisasi kampanye modern tidak hanya menyangkut teknik komunikasi, tetapi juga mencakup sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan setiap aktivitas kampanye selaras dengan tujuan strategis organisasi (Gibson, 2020:35–38). Dengan demikian, kampanye modern dipahami sebagai proses organisasi yang sistematis, bukan sekadar rangkaian aktivitas persuasi yang bersifat ad hoc.

Profesionalisasi tersebut berkaitan erat dengan upaya kampanye dalam mengelola ketidakpastian yang melekat pada kompetisi elektoral. Dalam konteks ini, Daniel Kreiss menekankan bahwa efektivitas kampanye sangat ditentukan oleh kapasitas organisasi untuk melakukan uncertainty reduction. Ketidakpastian mengenai preferensi pemilih, kekuatan dan strategi lawan, serta dinamika politik lokal merupakan tantangan utama dalam kampanye modern (Kreiss, 2016:23–27). Untuk mengurangi ketidakpastian tersebut, organisasi kampanye mengandalkan pengumpulan data pemilih, pemantauan aktivitas lapangan secara intensif, serta evaluasi berkelanjutan terhadap respons publik. Proses ini memungkinkan kampanye melakukan penyesuaian strategi secara cepat dan berbasis bukti, sehingga risiko kesalahan mobilisasi dapat diminimalkan (Kreiss, 2016:41–45).

Namun, pengelolaan ketidakpastian tidak dapat dilakukan secara efektif tanpa integrasi yang kuat antara perumusan strategi di tingkat pusat

dan pelaksanaan kampanye di tingkat lokal. Susan E. Scarrow menegaskan bahwa kampanye modern menuntut adanya central–local integration, yakni keterpaduan antara arah strategis yang dirumuskan secara terpusat dan fleksibilitas implementasi di tingkat lokal (Scarrow, 2015:92–95). Konsistensi pesan dan tujuan harus dijaga agar identitas kampanye tetap utuh, tetapi pada saat yang sama strategi perlu diterjemahkan secara adaptif sesuai dengan karakter pemilih, struktur sosial, dan dinamika politik setempat. Struktur organisasi yang berjenjang memungkinkan proses translasi ini berlangsung tanpa kehilangan kendali, karena pusat tetap memiliki mekanisme koordinasi dan pengawasan terhadap praktik lokal (Scarrow, 2015:101–104).

Secara keseluruhan, teori kampanye politik modern menunjukkan bahwa keberhasilan kampanye tidak lagi bergantung semata pada popularitas kandidat atau intensitas mobilisasi massa, melainkan pada kemampuan organisasi kampanye mengelola data, mengurangi ketidakpastian, serta mengintegrasikan strategi pusat dengan praktik lokal. Kampanye dipahami sebagai kerja organisasi yang kompleks, adaptif, dan berlapis, yang menuntut disiplin struktural sekaligus sensitivitas terhadap konteks lokal dalam setiap tahap kompetisi elektoral.

2.8. Teori Manajemen Kinerja

Pembahasan mengenai efektivitas organisasi pada akhirnya mengarah pada bagaimana kinerja individu dan unit kerja dikelola secara sistematis untuk mendukung pencapaian tujuan kolektif. Dalam konteks ini, Herman Aguinis mengembangkan performance management theory yang

menekankan bahwa organisasi yang berorientasi pada hasil tidak memandang kinerja sebagai aktivitas evaluasi yang bersifat sesaat. Sebaliknya, kinerja dikelola melalui suatu sistem terpadu yang menghubungkan proses rekrutmen, penetapan standar kerja, pemantauan kinerja, evaluasi berkelanjutan, serta pemberian konsekuensi organisasi, baik dalam bentuk penghargaan maupun penggantian peran (Aguinis, 2009:2–6). Dalam kerangka ini, indikator kinerja dirumuskan secara terukur agar kontribusi setiap individu dapat dinilai secara objektif dan dikaitkan langsung dengan tujuan strategis organisasi (Aguinis, 2009:21–24). Pemantauan yang berkelanjutan memungkinkan organisasi mendeteksi deviasi kinerja sejak dini dan melakukan koreksi sebelum penyimpangan tersebut berdampak pada pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.

Namun, sistem manajemen kinerja tidak dapat berdiri sendiri tanpa didukung oleh strategi pengelolaan sumber daya manusia yang selaras dengan arah organisasi. Pada titik ini, pendekatan Strategic Human Resource Management (SHRM) menjadi relevan. Patrick M. Wright dan Gary C. McMahan menegaskan bahwa organisasi tidak merekrut individu semata-mata berdasarkan ketersediaan tenaga kerja, melainkan berdasarkan kesesuaian antara kompetensi individu dan kebutuhan strategis organisasi (strategic staffing) (Wright & McMahan, 1992:297–300). Rekrutmen dipahami sebagai keputusan strategis yang menentukan kapasitas organisasi dalam mencapai tujuan jangka panjang, sehingga

aspek person–organization fit menjadi pertimbangan utama dalam pengelolaan kinerja sejak tahap awal (Wright & McMahan, 1992:310–312).

Pandangan tersebut kemudian diperdalam oleh Peter Boxall dan John Purcell, yang menekankan bahwa praktik SHRM berfungsi sebagai jembatan antara strategi organisasi dan perilaku individu di lapangan. Menurut mereka, sistem sumber daya manusia yang dirancang secara strategis akan membentuk pola perilaku kerja yang konsisten dengan tujuan organisasi, sekaligus memperkuat efektivitas sistem manajemen kinerja (Boxall & Purcell, 2011:7–11). Dengan demikian, kinerja tidak hanya dipahami sebagai hasil kerja individual, tetapi sebagai keluaran dari interaksi antara strategi organisasi, desain sistem SDM, dan kapasitas individu yang direkrut serta dikembangkan (Boxall & Purcell, 2011:63–66).

Secara keseluruhan, teori manajemen kinerja menunjukkan bahwa efektivitas organisasi bergantung pada keterpaduan antara indikator kinerja yang terukur, pemantauan berkelanjutan, dan strategi pengelolaan sumber daya manusia yang bersifat strategis. Kinerja individu menjadi bermakna ketika diletakkan dalam kerangka tujuan organisasi, sementara keberhasilan organisasi ditentukan oleh kemampuannya menyelaraskan rekrutmen, pengelolaan, dan evaluasi kinerja dengan arah strategis yang ingin dicapai.

3. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan berkaitan dengan relawan politik sebagai kekuatan elektoral baru: analisis peran dan pengaruhnya dalam pemilu dan pilkada di Indonesia.

Tabel 1.1 Penelitian terdahulu

1.	Judul	Strategi Komunikasi Politik Nurdin-Andi Sudirman
	Peneliti	Nadia Indriana Tenriawaru (2020)
	Masalah	Bagaimana Strategi Pemenangan Nurdin Abdullah – Andi Sudirman Sulaiman dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018 di Kota Makassar?
		Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemenangan yang telah dilakukan oleh pasangan Nurdin Abdullah- Andi Sudirman Sulaiman pada pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018 di Kota Makassar telah menghasilkan kemenangan adapun proses strategi yang dilakukan antaranya adalah menggunakan strategi pencitraan diantaranya pemimpin inovatif merawat ketokohan melalui kinerja dan prestasi, branding politik, merumuskan visi misi, pembentukan tim pememnangan dan relawan, membangun relasi sosial politik, kampanye melalui media massa, seta memanfaatkan dukungan partai politik.
	Relevansi dengan Relawan DOzer	Strategi pemenangan via relawan
2.	Judul	Strategi Politik Nurdin Abdullah Dan Andi Sudirman Sulaiman Pada Pemilihan Guberbur Sulawesi Selatan Tahun 2018
	Peneliti	Maulina Albar (2019)
	Masalah	1. Bagaimana pola marketing politik Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman pada pemilihan gubernur Sulawesi Selatan tahun 2018? 2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi keuggulan

		Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman dibanding calon lain?
	Hasil Penelitian	Strategi politik yang dilakukan oleh pasangan Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman dalam pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018 yaitu dengan melakukan pola marketing politik. Pola marketing politik diidentifikasi ke dalam 4P, yaitu produk (product), promosi (promotion), harga (price), dan penempatan (place). (1) Product: Pasangan Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman memiliki Visi dan Misi yang sangat inovatif baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan bidang pembangunan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat Sulawesi Selatan. (2) Promotion: Promosi yang dilakukan yaitu dengan melibatkan seluruh Tim Pemenangan, Partai politik pengusung, dan berbagai relawan yang tergaabung dalam tim Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman. Bentuknya berupa mengadakan kampanye baik kampanye dialogis dan kampanye door to door. (3) Price: Pasangan Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman menggunakan konsep branding political untuk membangun citra positif ke masyarakat. Merek politik yang dilakukan oleh pasangan ini adalah pribadi dan pengalaman Nurdin Abdullah sebagai Prof Andalan dan hasil kinerjanya sebagai Bupati Kabupaten Bantaeng. (4) Place: Lokasi tim pemenangan Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman sendiri tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan.
	Relevansi dengan Relawan Dozer	Jaringan luas seperti Dozer
3.	Judul	Strategi Gerakan Politik Milenial (Studi Kasus Barisan Muda-Na Pada Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018)
	Peneliti	Si Yusran (2021)
	Masalah	1. Bagaimana strategi Political Branding relawan Barisan Muda NA dalam kemenangan Nurdin Abdullah – Andi Sudirman Sulaiman pada Pilkada Sulawesi Selatan tahun 2018 ?

		2. Bagaimana strategi Media Marketing relawan Barisan Muda NA dalam pemenangan Nurdin Abdullah – Andi Sudirman Sulaiman pada Pilkada Sulawesi Selatan tahun 2018 ?
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian ini menggambarkan bagaimana strategi gerakan politik milenial yang dilakukan Relawan Barisan Muda-NA sehingga dapat dinilai efektif dalam memobilisasi suara masyarakat, hal tersebut menjadi daya tarik mereka untuk mendapatkan dukungan. Gaya kampanye dengan menghadirkan kegiatan musik, senam sehat, kampanye hidup sehat, peringatan hari Aids sedunia yang ditayangkan secara talkshow oleh stasiun tv, peringatan hari Bumi, pembagian bibit pohon, pemeriksaan kesehatan gratis, kampanye dengan cara mengadakan Fun Run dari Makassar ke Bantaeng sejauh 123 Kilometer, bazar musik, produksi baju2 kaos keren dan menjualnya ke kalangan2 pemuda ataupun masyarakat lain yg senang dgn Nurdin Abdullah. Dari kegiatan-kegiatan tersebut membuat lebih banyak kaum milenial terlibat secara langsung dalam memperkenalkan sosok Nurdin Abdullah.
	Relevansi dengan Relawan Dozer	Mobilisasi akar rumput

4. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berangkat dari fenomena relawan politik Dozer sebagai organisasi non-partai yang dibentuk secara terstruktur dan hierarkis untuk mendukung pasangan Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2024. Berbeda dengan relawan politik pada umumnya yang cenderung spontan dan informal, relawan Dozer menunjukkan karakteristik organisasi yang terencana, terkontrol, dan sistematis, dengan struktur berjenjang dari

tingkat provinsi hingga Tempat Pemungutan Suara (TPS). Keunikan ini memunculkan pertanyaan mendasar pertama, bagaimana relawan semacam ini terbentuk, bagaimana mereka berinteraksi dengan pemilih, dan faktor-faktor apa yang memengaruhi efektivitas dan keberlanjutan dukungan mereka.

Untuk memahami fenomena ini secara komprehensif, penelitian ini menggunakan kerangka pikir yang mengintegrasikan tiga dimensi utama yang saling terkait: (1) proses pembentukan relawan politik Dozer, (2) relasi antara relawan dan pemilih dalam membentuk partisipasi politik, dan (3) prinsip pertukaran kepentingan yang memengaruhi dinamika dukungan relawan. Ketiga dimensi ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling membentuk dan mempengaruhi dalam sebuah sistem mobilisasi politik yang kompleks.

Kedua, pertukaran antara koordinator kecamatan/kelurahan dengan relawan TPS. Pada level ini, relawan yang bekerja di lapangan melakukan *door-to-door* (dari pintu ke pintu), berinteraksi langsung dengan pemilih, mengumpulkan data, dan mengawal TPS juga memiliki ekspektasi tertentu terhadap apa yang mereka peroleh dari keterlibatan mereka. Meskipun secara resmi mereka disebut sebagai "relawan" yang bekerja secara sukarela, dalam praktiknya sebagian besar dari mereka menerima kompensasi dalam berbagai bentuk: uang saku harian atau per kegiatan, konsumsi dan transportasi, paket sembako atau merchandise, serta akses ke jaringan sosial dan tokoh politik yang sebelumnya sulit dijangkau. Selain insentif material, relawan TPS juga termotivasi oleh insentif non-material

seperti kepuasan personal berkontribusi pada pemenangan kandidat yang mereka yakini, kebersamaan dan solidaritas dengan sesama relawan, serta pengalaman dan pembelajaran dalam kerja-kerja politik yang dapat berguna untuk keterlibatan politik mereka di masa depan.

Ketiga, pertukaran antara relawan dengan pemilih. Pada level ini, pertukaran berlangsung dalam bentuk yang paling kontroversial dan rentan terhadap kritik etis, yaitu praktik yang sering disebut sebagai politik uang atau *money politics*. Dalam praktik ini, relawan atau koordinator mendistribusikan uang tunai, sembako, atau bantuan material lainnya kepada pemilih menjelang hari pemungutan suara dengan ekspektasi bahwa pemilih akan memberikan suara mereka kepada pasangan calon yang didukung. Praktik ini sangat umum terjadi dalam pemilu lokal di Indonesia, meskipun secara hukum dilarang dan dapat dikenai sanksi pidana. Selain pertukaran material yang eksplisit, pertukaran pada level ini juga dapat berbentuk janji program atau janji akses ke layanan publik jika pasangan calon menang, yang bersifat lebih implisit dan sulit dibuktikan sebagai pelanggaran hukum.

Mekanisme kontrol relasi insentif dalam relawan Dozer dirancang untuk memastikan bahwa pertukaran kepentingan berlangsung dalam kerangka yang terukur, akuntabel, dan tidak menimbulkan ekspektasi yang tidak realistis atau tidak dapat dipenuhi. Mekanisme ini mencakup: penetapan target terukur yang menjadi dasar pemberian insentif (misalnya, koordinator yang mencapai target mobilisasi pemilih akan mendapat bonus, sementara yang tidak mencapai target akan mendapat teguran), sistem

pelaporan yang memungkinkan pusat memantau apakah insentif yang diberikan menghasilkan kinerja yang diharapkan, transparansi dalam distribusi insentif untuk menghindari kecemburuan atau konflik internal, serta mekanisme *reward dan punishment* yang diterapkan secara konsisten untuk menjaga disiplin organisasi.

Namun, praktik pertukaran kepentingan dalam relawan Dozer menghasilkan dampak yang ambivalen terhadap efektivitas mobilisasi dan kualitas demokrasi lokal. Pada sisi positif, sistem insentif yang terstruktur dan terukur berkontribusi terhadap peningkatan loyalitas relawan, motivasi kerja yang lebih tinggi, efisiensi mobilisasi karena relawan bekerja dengan target yang jelas, dan solidaritas internal karena adanya sistem apresiasi yang adil. Data lapangan menunjukkan bahwa wilayah-wilayah dengan sistem insentif yang jelas dan konsisten cenderung memiliki tingkat kinerja relawan yang lebih baik dibandingkan dengan wilayah yang tidak memiliki sistem insentif yang jelas.

Namun, pada sisi negatif, ketergantungan pada insentif material berisiko mengurangi kesukarelaan genuine dari relawan, mengubah partisipasi politik menjadi transaksional alih-alih ideologis, serta menciptakan ketergantungan yang membuat relawan tidak berkelanjutan pasca-pemilu ketika insentif tidak lagi tersedia. Lebih jauh lagi, praktik pertukaran kepentingan terutama dalam bentuk politik uang berkontribusi terhadap reproduksi patronase yang melanggengkan kultur politik transaksional di tingkat lokal, yang pada gilirannya merusak kualitas

demokrasi substansial dengan mengubah relasi warga-negara menjadi relasi patron-klien.

Ketegangan antara efektivitas elektoral dan idealisme demokrasi ini menjadi dilema sentral yang harus dihadapi oleh aktor politik yang terlibat dalam mobilisasi relawan. Di satu sisi, dalam konteks kompetisi elektoral yang sangat ketat, mengabaikan prinsip pertukaran kepentingan sama artinya dengan mengurangi daya saing kampanye karena pasangan calon lain hampir pasti menggunakan strategi serupa. Di sisi lain, terlalu bergantung pada pertukaran material berisiko merusak reputasi kandidat, melanggar hukum pemilu, serta melanggar kultur politik yang tidak sehat. Oleh karena itu, strategi yang ditempuh oleh relawan Dozer adalah mencari keseimbangan pragmatis antara penggunaan insentif yang cukup untuk menjaga motivasi dan efektivitas relawan, dengan upaya membangun kesadaran ideologis dan komitmen jangka panjang melalui pembekalan, sosialisasi nilai, dan pembangunan identitas kolektif yang lebih bermakna dari sekadar pertukaran material.

Ketiga dimensi analisis proses pembentukan relawan, relasi relawan-pemilih, dan pertukaran kepentingan tidak berdiri sendiri melainkan saling terkait dalam sebuah sistem mobilisasi politik yang terintegrasi. Proses pembentukan relawan membentuk struktur organisasi, pola komando, dan motivasi relawan yang kemudian menentukan bagaimana relasi relawan-pemilih berlangsung di lapangan. Desain organisasi yang hierarkis dan terpusat menciptakan pola mobilisasi yang terstruktur dan terukur, di mana relawan bekerja berdasarkan instruksi dan target yang ditetapkan dari

pusat, bukan berdasarkan inisiatif spontan. Motivasi relawan yang terbentuk sejak tahap perekrutan baik ideologis, relasional, maupun pragmatis mempengaruhi cara mereka mendekati pemilih, membangun kepercayaan, dan melakukan persuasi.

Sementara itu, relasi relawan-pemilih tidak dapat dipisahkan dari prinsip pertukaran kepentingan yang menjadi salah satu mekanisme utama dalam mobilisasi. Efektivitas relawan dalam menggerakkan pemilih sangat bergantung pada sistem insentif yang diterapkan, baik insentif yang diterima relawan dari koordinator maupun insentif yang diberikan relawan kepada pemilih. Pertukaran kepentingan bukan hanya memengaruhi loyalitas dan kinerja relawan, tetapi juga membentuk kualitas partisipasi politik yang terbangun apakah partisipasi tersebut bersifat bermakna dan berkelanjutan, atau bersifat instrumental dan transaksional.

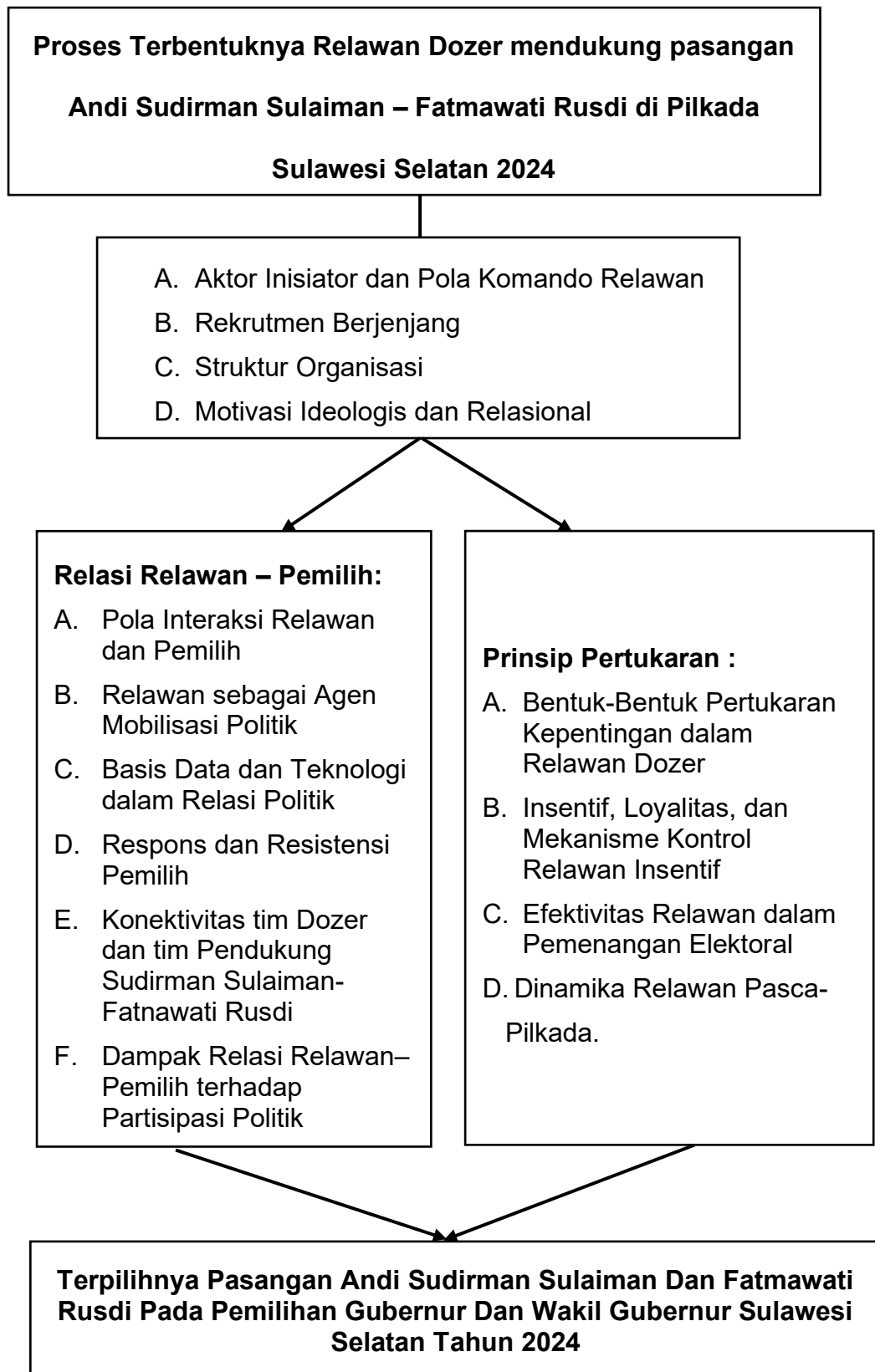
Secara keseluruhan, integrasi ketiga dimensi analisis ini menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana relawan politik terorganisir bekerja dalam konteks pemilu lokal di Indonesia, khususnya di wilayah perkotaan seperti Kota Makassar yang memiliki karakteristik sosial-politik yang kompleks. Penelitian ini tidak hanya bertujuan menjelaskan mekanisme teknis mobilisasi relawan, tetapi juga menganalisis secara kritis implikasi praktik mobilisasi terorganisir terhadap kualitas demokrasi lokal apakah relawan politik berfungsi sebagai instrumen penguatan partisipasi warga dan penguatan demokrasi substansial, atau justru menjadi instrumen reproduksi patronase dan politik transaksional yang melemahkan kualitas demokrasi.

Lebih jauh lagi, posisi unik peneliti sebagai Panglima Dozer memberikan perspektif insider yang memungkinkan analisis mendalam terhadap dinamika "panggung belakang" organisasi melawan proses pengambilan keputusan strategis, negosiasi internal, pengelolaan konflik, serta dilema etis yang dihadapi dalam praktik mobilisasi yang jarang dapat diakses oleh peneliti eksternal. Meskipun posisi ini menciptakan tantangan metodologis terkait bias subjektivitas, namun dengan pendekatan refleksif yang konsisten dan triangulasi data yang ketat, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pengetahuan yang bernilai tinggi baik untuk pengembangan teori partisipasi politik maupun perbaikan praktik mobilisasi politik di Indonesia.

Pada akhirnya, penelitian ini tidak hanya menghasilkan deskripsi empiris tentang bagaimana melawan Dozer terbentuk dan bekerja, tetapi juga memberikan refleksi kritis tentang ketegangan antara pragmatisme elektoral dan idealisme demokrasi, antara efektivitas jangka pendek dan keberlanjutan jangka panjang, serta antara kepentingan kemenangan elektoral dan tanggung jawab terhadap penguatan kualitas demokrasi lokal. Refleksi kritis ini penting tidak hanya untuk konteks Pilkada Sulawesi Selatan 2024, tetapi juga untuk memberikan pembelajaran bagi pemilu-pemilu lokal di masa depan di berbagai daerah di Indonesia yang menghadapi dilema serupa dalam upaya menyeimbangkan efektivitas mobilisasi dengan integritas demokrasi.

5. Skema Pikir

Gambar 1.1 Skema Pikir



H. Metodologi Penelitian

Metode penelitian dalam studi ini disusun untuk memastikan bahwa proses pengumpulan dan analisis data dilakukan secara sistematis, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Uraian metode penelitian ini mencakup: pertama, desain penelitian yang menjelaskan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan; kedua, lokasi dan waktu penelitian sebagai konteks empirik penelitian; ketiga, sumber data yang menjadi basis informasi penelitian; keempat, teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data yang relevan; dan kelima, teknik analisis data sebagai prosedur pengolahan dan penafsiran data penelitian. Kelima unsur tersebut diuraikan sebagai berikut.

1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif fenomenologis untuk memahami secara mendalam peran dan strategi relawan dalam politik elektoral di Sulawesi Selatan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menggali pengalaman, persepsi, serta pola kerja relawan dalam mendukung pasangan calon (paslon) di pemilu dan pilkada.

Pendekatan kualitatif digunakan karena mampu menangkap makna subjektif dari pengalaman individu dan kelompok yang terlibat dalam fenomena politik (Cresswell, 2013, hlm. 45). Kemudian (Patton et al., 2015, hlm. 52) pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pengalaman sosial secara mendalam dengan menggunakan metode

wawancara, observasi, dan analisis dokumen (Denzin & Lincoln, 2018, hlm. 57).

Fenomenologi digunakan untuk mengungkap realitas sosial yang dialami relawan secara langsung, termasuk bagaimana mereka mengorganisasikan diri, membangun jaringan, dan menjalankan strategi pemenangan. Sebagaimana dijelaskan oleh (Moustakas, 1994, hlm. 13), fenomenologi bertujuan untuk memahami esensi dari pengalaman individu berdasarkan persepsi dan refleksi mereka terhadap suatu fenomena. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kontribusi relawan sebagai kekuatan politik baru di luar partai politik.

Desain penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan tujuan utama menggambarkan secara mendalam bagaimana relawan politik beroperasi dalam konteks pemilu dan pilkada di Sulawesi Selatan. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada deskripsi fenomena, tetapi juga berusaha menjelaskan bagaimana relawan politik mengembangkan strategi, membangun jaringan sosial, dan beradaptasi dengan dinamika politik lokal.

Dalam desain ini, peneliti menggunakan metode fenomenologi deskriptif, yang berfokus pada pengalaman subjektif relawan politik dalam menjalankan aktivitas mereka. Fenomenologi memungkinkan peneliti untuk memahami motivasi, strategi, serta tantangan yang dihadapi relawan dalam konteks kontestasi elektoral. Dengan menggali pengalaman langsung para relawan, penelitian ini berusaha menemukan pola dan makna yang

mendasari keterlibatan mereka dalam politik (Smith, Flowers, & Larkin, 2009, hlm. 41).

Penelitian ini juga mengadopsi pendekatan studi kasus, yang memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap peran relawan dalam pemilu dan pilkada. Studi kasus yang diangkat mencakup berbagai kelompok relawan dengan latar belakang yang beragam, termasuk relawan independen, relawan berbasis komunitas, serta relawan yang terafiliasi dengan partai politik. Dengan memilih studi kasus ini, penelitian dapat mengungkap perbedaan strategi dan efektivitas relawan dalam konteks yang berbeda-beda.

Selain itu, penelitian ini menggunakan analisis tematik, di mana data yang dikumpulkan dianalisis berdasarkan tema-tema utama yang muncul dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Beberapa tema utama yang akan dianalisis meliputi:

1. Strategi Mobilisasi Relawan: Bagaimana relawan membangun dukungan dan memperluas jangkauan kampanye mereka.
2. Peran Media Sosial: Seberapa besar pengaruh media sosial dalam meningkatkan partisipasi politik dan menyebarkan informasi politik.
3. Hubungan dengan Partai Politik: Sejauh mana relawan bekerja secara independen atau berkoordinasi dengan partai politik.

4. Dampak Relawan terhadap Hasil Pemilu: Bagaimana keterlibatan relawan berkontribusi terhadap kemenangan pasangan calon tertentu.

Dalam implementasi desain penelitian ini, peneliti melakukan triangulasi metode untuk meningkatkan validitas data. Triangulasi dilakukan dengan:

1. Wawancara Mendalam: Melibatkan berbagai pihak, termasuk anggota relawan, koordinator kampanye, akademisi, dan pengamat politik.
2. Observasi Partisipatif: Mengikuti langsung kegiatan relawan dalam kampanye, termasuk pertemuan strategis, kegiatan tatap muka dengan pemilih, serta distribusi materi kampanye.
3. Dokumentasi: Mengumpulkan laporan, berita, dan data sekunder dari sumber terpercaya seperti KPU, Bawaslu, serta media massa.

Keunggulan desain penelitian ini adalah kemampuannya untuk memberikan pemahaman yang holistik dan kontekstual terhadap fenomena relawan politik. Dengan menitikberatkan pada pengalaman individu serta dinamika kelompok relawan, penelitian ini mampu mengungkap bagaimana relawan berkontribusi dalam demokrasi elektoral di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, dengan Provinsi Sulawesi Selatan digunakan sebagai konteks politik regional. Sulawesi Selatan merupakan salah satu wilayah dengan dinamika politik yang relatif kompleks di Indonesia, ditandai oleh tingginya keterlibatan masyarakat dalam berbagai proses elektoral, baik pada pemilu nasional maupun pemilihan kepala daerah (Aspinall & Mietzner, 2019, hlm. 217).

Fokus utama penelitian ini dibatasi pada Kota Makassar, yang dipilih karena berfungsi sebagai pusat utama aktivitas dan konsolidasi relawan politik di Sulawesi Selatan. Pemilihan Makassar didasarkan pada tingginya tingkat partisipasi politik serta keberadaan kelompok relawan yang relatif aktif dan terorganisasi dalam mendukung pasangan calon pada pemilu dan pilkada (Hadiz & Robison, 2017, hlm. 98).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, struktur demografi Kota Makassar didominasi oleh penduduk usia produktif. Kelompok usia 15–39 tahun, yang mencakup generasi milenial dan generasi Z menempati proporsi yang signifikan dalam populasi. Kelompok generasi ini dikenal memiliki kecenderungan lebih aktif dalam politik berbasis digital serta keterlibatan dalam kegiatan kerelawanan politik, baik secara daring maupun luring (Nugroho, 2020, hlm. 67).

Selain memiliki basis pemilih yang besar, Kota Makassar juga menunjukkan pola keterlibatan masyarakat sipil yang relatif kuat dalam mendukung kandidat tertentu. Relawan politik di Makassar memainkan

peran strategis dalam menyebarkan informasi politik, mengorganisasi pemilih, serta membangun jejaring sosial untuk mendukung kandidat yang mereka pilih (Tarrow, 1996, hlm. 89). Hal ini menegaskan bahwa relawan tidak hanya berfungsi sebagai pendukung pasif, tetapi sebagai aktor politik yang aktif dan berpengaruh dalam proses elektoral.

Penelitian ini dilaksanakan selama enam bulan, mencakup tahapan pengumpulan hingga analisis data. Proses penelitian dilakukan melalui observasi lapangan di Kota Makassar, wawancara mendalam dengan relawan politik, serta analisis dokumen dan data sekunder. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran, strategi, dan dinamika relawan dalam politik elektoral di tingkat kota.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data akan diperoleh dari dua sumber, yaitu :

1. Data primer: Data yang di peroleh langsung dari informan, dengan memakai teknik pengumpulan berupa data interview (wawancara) serta melakukan observasi (pengamatan langsung) terhadap objek penelitian.
2. Data sekunder: Data yang di peroleh dari dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan, maupun arsip-arsip resmi, serta literatur yang relevan dalam melengkapi data primer penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup laporan pemilu dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), hasil survei politik, serta berita dari media lokal dan nasional yang

membahas keterlibatan relawan dalam PemiluKada Sulawesi Selatan 2024

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif fenomenologis untuk memahami secara mendalam peran dan strategi relawan dalam politik elektoral di Makassar, khususnya dalam PemiluKada Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 yang mempertemukan dua pasangan calon dalam kontestasi politik. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menggali pengalaman, persepsi, serta pola kerja relawan dalam mendukung pasangan calon (paslon) dalam pilkada Sulawesi selatan tahun 2024.

4.1 Wawancara Mendalam (In depth Interview)

Studi ini melakukan wawancara langsung terhadap informan yang bersangkutan dengan masalah penelitian ini. Wawancara antara peneliti dan informan face to face kemudian mengajukan beberapa pertanyaan yang menjadi inti masalah penelitian kepada informan, selanjutnya para informan ini memberikan jawaban menurut mereka masing-masing. Metode ini dikenal dengan wawancara In-depth interview yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab bertatap muka antara pewawancara dengan informan, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara dalam hal ini wawancara yang akan dilakukan dengan narasumber yang memiliki pengalaman langsung dalam pergerakan politik berbasis relawan. Informan dalam penelitian ini

dikategorikan sebagai sumber data primer yang dapat memberikan wawasan mendalam mengenai dinamika organisasi dan strategi relawan politik. Informan yang dipilih mencakup:

1. Koordinator Relawan Politik: individu yang mengorganisir dan memimpin komunitas relawan dalam kampanye politik untuk kedua pasangan calon di Pemiluada Sulawesi Selatan 2024.
2. Anggota Relawan Aktif: individu yang berpartisipasi dalam mobilisasi dukungan di tingkat lokal.
3. Tim Kampanye Pasangan Calon: perwakilan resmi dari masing-masing pasangan calon yang bekerja sama dengan relawan dalam menyusun strategi pemenangan.
4. Akademisi dan Pengamat Politik: pakar yang memberikan perspektif teoretis mengenai kekuatan politik relawan dalam Pemiluada Sulawesi Selatan 2024.

4.2 Observasi (Observation)

Kegiatan observasi meliputi pengamatan, secara sistematis, kejadian-kejadian, perilaku dilokasi penelitian yang sedang dilakukan. Teknik observasi berguna untuk menjelaskan dan merinci fenomena yang terjadi, dimaksudkan untuk pengumpulan data selektif sesuai dengan pandangan peneliti. Selain itu terdapat data yang tidak dapat ditanyakan kepada informan, diantaranya membutuhkan pengamatan secara langsung oleh peneliti. Beberapa item yang memerlukan observasi yakni keadaan tempat atau aktivitas yang sedang berlangsung, benda, peralatan,

perlengkapan, yang terdapat di lokasi penelitian; para pelaku, status, jenis kelamin, usia dan sebagainya. Tindakan-tindakan serta peristiwa yang sedang berlangsung.

4.3 Studi Literatur

Studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian.

4.4 Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data dengan menelusuri dokumen-dokumen milik instansi terkait. Dokumentasi dapat diasumsikan sebagai sumber data tertulis yang terbagi dalam dua kategori yaitu sumber resmi dan sumber tidak resmi. Sumber resmi merupakan dokumen yang dibuat atau dikeluarkan oleh perorangan atas nama Sedangkan sumber tidak resmi adalah dokumen yang dibuat/dikeluarkan oleh individu tidak atas nama Dokumen yang akan dijadikan sebagai sumber referensi dapat berupa artikel di surat kabar, artikel di internet dan lain sebagainya.

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar yang memiliki dinamika politik yang kompleks dan peran relawan yang signifikan dalam proses elektoral. Observasi non-partisipatoris diterapkan untuk mencermati pola interaksi dan strategi kampanye yang dilakukan oleh relawan di lapangan. Selain itu, triangulasi data dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, serta kajian literatur terkait.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian lapangan, peneliti memperoleh data mentah, catatan data dari lapangan, dan data yang dipilih atau diproses yang muncul dalam laporan terakhir. Sebab itu peneliti melakukan proses pemeriksaan, pemilahan, penggolongan, evaluasi, dan perenungan data yang dicodekan serta mengkaji data mentah dan data yang direkam. Langkah selanjutnya adalah membuat deskripsi tentang isu penelitian dan dianalisa serta diinterpretasikan sesuai fokus dari penelitian. Tahap terakhir analisa adalah peneliti menyusun proposisi atas dasar data dan pada tahap ini peneliti mulai membuka bracketing dan dapat membandingkan antara data yang diperoleh dengan teori dan hasil-hasil studi terdahulu maupun informasi dari para ahli.

Penelitian kualitatif tidak sekedar menyajikan data empiris yang didapat peneliti dari lapangan, tetapi ia punya makna lebih, yaitu data lapangan dapat mengungkapkan makna yang ada dibalik apa yang diamati peneliti. Oleh karenanya dalam pengolahan dan analisis data, peneliti tidak hanya mendisktrisikan kegiatan- kegiatan komunitas, tetapi peneliti menganalisis bagaimana informan memberi makna terhadap setiap informasi, ungkapan atau data yang diperoleh dari lapangan.

Dalam proses analisis, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis tematik, di mana data yang dikumpulkan diklasifikasikan berdasarkan tema utama yang muncul dari wawancara dan observasi. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran relawan sebagai

kekuatan politik baru dalam demokrasi elektoral di Indonesia, khususnya dalam Pemilukada Sulawesi Selatan 2024.

BAB II

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

Bab ini menyajikan gambaran umum obyek penelitian sebagai landasan kontekstual untuk memahami fenomena Relawan Dozer dalam Pilkada Sulawesi Selatan 2024. Pemahaman yang memadai terhadap obyek penelitian tidak cukup hanya bertumpu pada aspek organisasi relawan semata, melainkan harus berakar pada konteks sosial, geografis, demografis, dan politik tempat relawan itu tumbuh dan beroperasi.

Gambaran umum dalam bab ini disusun dengan lima aspek. *Pertama*, profil geografis dan demografis Kota Makassar sebagai arena utama berlangsungnya mobilisasi politik Relawan Dozer; *Kedua*, struktur pemerintah daerah Kota Makassar; *Ketiga*, dinamika politik lokal Kota Makassar; *Keempat*, Pemilihan kepala daerah di Kota Makassar, yang menempatkan Pilkada Gubernur 2024 dalam rentang historis kontestasi elektoral lokal. *Kelima*, sejarah terbentuknya Relawan Dozer. Untuk mendapatkan pemahaman secara utuh terkait kelima aspek tersebut, maka diuraikan sebagai berikut.

A. Profil Geografis dan Demografis Kota Makassar

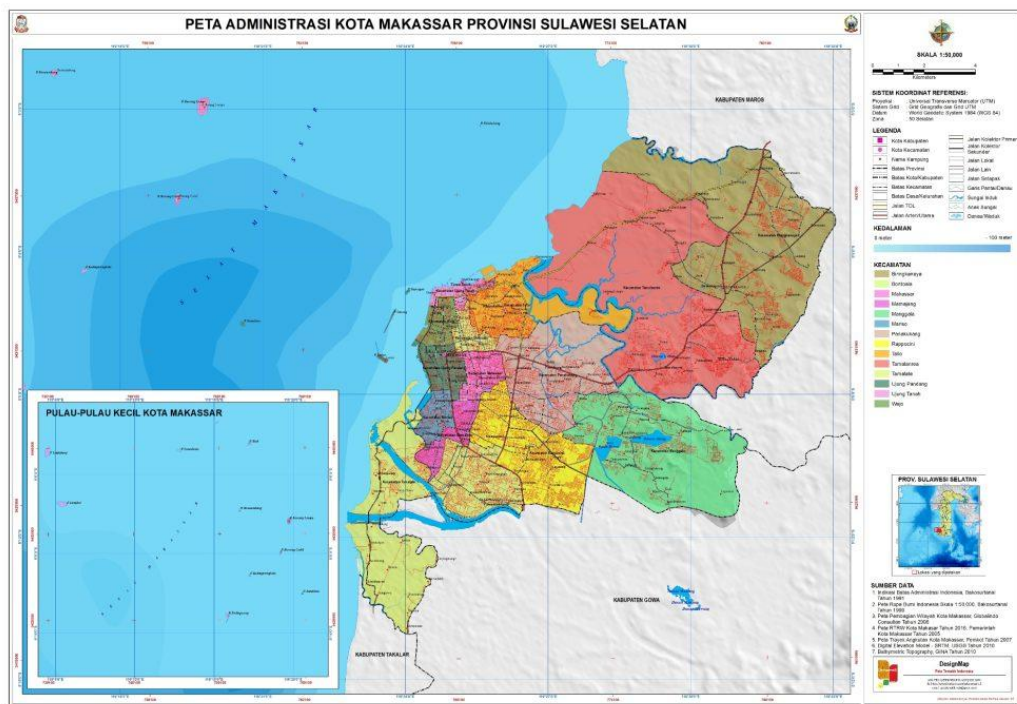
Kota Makassar merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak di pesisir barat daya Pulau Sulawesi, tepatnya pada koordinat 5°8' Lintang Selatan dan 119°25' Bujur Timur. Sebagai kota metropolitan terbesar di Indonesia Timur, Makassar memiliki luas wilayah sekitar 175,79

km² yang terbagi dalam 15 kecamatan dan 153 kelurahan (BPS Kota Makassar, 2023). Posisi geografis Makassar yang strategis menjadikannya sebagai pintu gerbang kawasan Indonesia Timur, sekaligus pusat perdagangan, pendidikan, dan pemerintahan di Sulawesi Selatan.

Lokasi penelitian ditetapkan di wilayah administratif Provinsi Sulawesi Selatan, dengan fokus pada Kota Makassar. Secara demografis, Pemilihan wilayah ini didasarkan pada keragaman karakter wilayah yang mencakup kawasan perkotaan, peri urban, dan wilayah penyangga, serta dinamika politik lokal yang relatif kompleks. Selain itu, Kota Makassar merupakan arena penting keterlibatan berbagai aktor dan aktivitas politik yang relevan dengan fokus penelitian, khususnya dalam konteks relawan politik dan kompetisi elektoral. Penyajian profil lokasi penelitian pada subbab ini bertujuan untuk memberikan konteks empiris mengenai kondisi wilayah tempat data penelitian diperoleh.

Kota Makassar merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan pelayanan publik di tingkat provinsi. Secara geografis, kota ini terletak di pesisir barat Pulau Sulawesi dan berbatasan langsung dengan Selat Makassar, sehingga memiliki posisi strategis sebagai simpul utama konektivitas wilayah di kawasan Indonesia Timur. Letak geografis tersebut mendorong tingginya mobilitas penduduk, arus informasi, serta intensitas aktivitas sosial dan politik yang menjadikan Kota Makassar sebagai laboratorium empiris yang relevan untuk mengkaji dinamika politik lokal.

Secara administratif, Kota Makassar memiliki luas wilayah sekitar 175,77 km² dan terbagi ke dalam 15 kecamatan serta 153 kelurahan. Pembagian wilayah administratif ini mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, termasuk pelaksanaan tahapan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Infrastruktur perkotaan yang relatif memadai, seperti jaringan jalan, fasilitas publik, dan sarana komunikasi, memberikan dukungan teknis bagi aktivitas sosial dan politik di wilayah ini (Badan Pusat Statistik Kota Makassar, 2024).



Gambar 4.9. Peta Administratif Kota Makassar

Dari sisi demografis, jumlah penduduk Kota Makassar pada tahun 2024 tercatat sekitar 1,47 juta jiwa, menjadikannya kota dengan jumlah penduduk terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan. Kepadatan penduduk yang tinggi serta komposisi masyarakat yang heterogen membentuk dinamika sosial perkotaan yang kompleks. Kondisi tersebut berimplikasi

pada tingginya intensitas interaksi sosial, keragaman kepentingan publik, serta variasi saluran komunikasi yang digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari (Badan Pusat Statistik Kota Makassar, 2024).

Tabel 2.1 Profil Kota Makassar sebagai Lokasi Penelitian

Indikator	Nilai	Keterangan
Status administratif	Ibu kota provinsi	Pusat pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan
Letak geografis	Pesisir barat Pulau Sulawesi	Berbatasan langsung dengan Selat Makassar
Luas wilayah	± 175,77 km ²	Wilayah perkotaan
Jumlah kecamatan	15	Unit administrasi tingkat kecamatan
Jumlah kelurahan	153	Unit administrasi tingkat kelurahan
Jumlah penduduk (2024)	± 1.470.000 jiwa	Terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan
Kepadatan penduduk	Tinggi	Konsentrasi penduduk perkotaan
Karakter wilayah	Perkotaan	Mobilitas dan interaksi sosial tinggi

B. Struktur Pemerintah Daerah Kota Makassar

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kota Makassar menjalankan sistem pemerintahan desentralisasi dengan struktur kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepala daerah (Pilkada). Struktur pemerintahan

Kota Makassar terdiri dari dua pilar utama: eksekutif dan legislatif. Kedua pilar tersebut diurai sebagai berikut.

2.1 Lembaga Eksekutif

Lembaga eksekutif di Kota Makassar dipimpin oleh Walikota dan Wakil Walikota yang dipilih dalam satu paket melalui Pilkada dengan masa jabatan lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Walikota memiliki kewenangan penuh dalam menjalankan pemerintahan daerah, termasuk menetapkan kebijakan daerah, mengelola keuangan daerah, mengangkat dan memberhentikan pejabat struktural, serta menjalankan program-program pembangunan (Permendagri No. 13 Tahun 2006).

Dalam menjalankan tugasnya, Walikota dibantu oleh Sekretaris Daerah (Sekda), perangkat daerah yang terdiri dari Dinas, Badan, dan Kantor, serta 15 Camat yang memimpin pemerintahan di tingkat kecamatan. Struktur birokrasi pemerintahan Kota Makassar relatif besar dengan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) mencapai lebih dari 15.000 orang (BKD Kota Makassar, 2022). Besarnya mesin birokrasi ini memiliki implikasi ganda: di satu sisi memungkinkan pelayanan publik yang lebih luas, namun di sisi lain menciptakan potensi politisasi birokrasi, terutama menjelang pemilihan kepala daerah (Aspinall & Sukmajati, 2016, p. 112).

2.2 Lembaga Legislatif

Lembaga legislatif di Kota Makassar adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar yang beranggotakan 50 orang,

dipilih melalui pemilihan umum legislatif (Pileg) dengan sistem proporsional terbuka. DPRD memiliki tiga fungsi utama: legislasi (membuat peraturan daerah), anggaran (menyusun dan menetapkan APBD bersama Walikota), dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan kebijakan pemerintah daerah (UU No. 23 Tahun 2014, Pasal 101).

Komposisi DPRD Kota Makassar periode 2019-2024 terdiri dari 12 partai politik dengan konfigurasi sebagai berikut: Partai Golkar (9 kursi), Partai Gerindra (8 kursi), Partai Demokrat (7 kursi), PKB (5 kursi), PDI-P (5 kursi), PAN (4 kursi), PKS (3 kursi), NasDem (3 kursi), PPP (2 kursi), Hanura (2 kursi), Perindo (1 kursi), dan PBB (1 kursi) (KPU Kota Makassar, 2019). Fragmentasi partai politik yang tinggi di DPRD menciptakan dinamika politik transaksional, di mana pembentukan koalisi seringkali tidak didasarkan pada kedekatan ideologi melainkan pada kalkulasi pragmatis untuk mengamankan akses terhadap sumber daya politik dan ekonomi (Slater, 2004, p. 78; Tomsa, 2014, p. 134).

C. Dinamika Politik Lokal Kota Makassar

Politik lokal di Kota Makassar memiliki karakteristik khas yang berbeda dari pola politik di kota-kota besar di Jawa. Beberapa ciri utama dari dinamika politik Makassar; **pertama**, Kuatnya Politik Identitas Berbasis Kesukuan. Meskipun Makassar merupakan kota yang relatif heterogen, identitas kesukuan masih memainkan peran penting dalam politik elektoral. Suku Makassar dan Bugis sebagai dua kelompok etnis mayoritas seringkali menjadi basis mobilisasi politik, terutama melalui mekanisme kekerabatan dan patronase (Pelras, 1996, p. 234). Dalam beberapa Pilkada, isu tentang

"putra daerah" versus "pendatang" menjadi narasi yang efektif untuk memobilisasi dukungan, meskipun tidak selalu secara terbuka diucapkan (Bubandt, 2014, p. 89). **Kedua**, Struktur politik Makassar sangat dipengaruhi oleh jaringan patronase yang melibatkan elit lokal seperti pengusaha, tokoh adat, ulama, dan birokrat senior (Winters, 2011, p. 167). Patronase bekerja melalui pertukaran material (uang, pekerjaan, proyek) dengan dukungan politik, menciptakan hubungan yang bersifat vertikal dan personal antara patron (elite) dan klien (pemilih) (Aspinall & Sukmajati, 2016, p. 45). Dalam konteks Pilkada, kandidat yang memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi yang besar memiliki keunggulan signifikan karena mampu membangun dan memelihara jaringan patronase yang luas. **Ketiga**, Fenomena politisasi birokrasi masih menjadi tantangan dalam tata kelola pemerintahan Kota Makassar. ASN seringkali dimobilisasi untuk mendukung kandidat tertentu dalam Pilkada, baik melalui tekanan struktural maupun insentif material (Aspinall, 2014, p. 203). Selain itu, praktik money politics dalam bentuk pembagian uang tunai, sembako, atau barang lainnya masih marak terjadi, terutama menjelang hari pemungutan suara. Laporan Bawaslu Kota Makassar (2018, p. 12) mencatat puluhan kasus dugaan politik uang dalam Pilkada 2018, meskipun hanya sebagian kecil yang dapat diproses secara hukum. **Keempat**, Seiring dengan meningkatnya penetrasi internet dan penggunaan media sosial di Makassar, kampanye politik mengalami transformasi dari pola konvensional (tatap muka, spanduk, iklan media massa) menjadi kampanye digital yang memanfaatkan Facebook, Instagram, Twitter, dan WhatsApp (Lim, 2013, p.

45). Kampanye digital memungkinkan kandidat untuk menjangkau pemilih dalam jumlah besar dengan biaya yang relatif rendah, sekaligus membuka ruang bagi partisipasi publik yang lebih luas. Namun, digitalisasi kampanye juga memunculkan tantangan baru seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan kampanye hitam yang sulit dikendalikan (Mietzner, 2018, p. 178).

D. Pemilihan Kepala Daerah di Kota Makassar

Pilkada di Kota Makassar telah berlangsung beberapa kali sejak era reformasi, dengan pola kompetisi yang semakin terbuka namun juga semakin mahal. Pilkada Makassar 2008, 2013, 2018, dan 2024 memperlihatkan tren peningkatan biaya kampanye, fragmentasi dukungan partai politik, serta maraknya penggunaan relawan dan tim sukses sebagai instrumen mobilisasi pemilih (Choi, 2014, p. 98).

Dalam Pilkada 2018, Kota Makassar mencatat tingkat partisipasi pemilih sebesar 76,8%, melampaui rata-rata nasional (KPU Kota Makassar, 2019, p. 8). Tingginya partisipasi ini tidak terlepas dari mobilisasi masif yang dilakukan oleh tim kampanye masing-masing pasangan calon, termasuk melalui jaringan relawan yang beroperasi hingga tingkat kelurahan. Namun, tingginya partisipasi tidak serta-merta mencerminkan kualitas demokrasi yang substansial, mengingat masih maraknya praktik money politics dan mobilisasi berbasis patronase (Aspinall & Berenschot, 2019, p. 234).

Dinamika serupa terulang dalam Pilkada Gubernur Sulawesi Selatan 2024 yang diselenggarakan pada 27 November 2024. Pilkada kali ini diikuti

oleh tiga pasangan calon: (1) Andi Sudirman Sulaiman – Fatmawati Rusdi (ANDI-WATI) yang diusung oleh koalisi partai politik termasuk Partai Golkar, Gerindra, dan PKB; (2) Fauzi Daud – Tenri Olle Yasin Limpo yang didukung oleh koalisi PDI-P, Demokrat, dan NasDem; serta (3) Edy Manaf – Muflihun yang diusung oleh PKS dan beberapa partai kecil (KPU Sulsel, 2024). Kontestasi ini berlangsung ketat mengingat ketiga pasangan calon memiliki basis dukungan yang kuat di berbagai daerah di Sulawesi Selatan.

Kota Makassar menjadi medan pertarungan yang sangat strategis dalam Pilkada Gubernur 2024 ini. Dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) mencapai 1.037.163 pemilih atau sekitar 17% dari total DPT Sulawesi Selatan yang berjumlah 6,8 juta pemilih, Makassar menjadi basis suara terbesar yang dapat menentukan kemenangan salah satu pasangan calon (KPU Sulsel, 2024, p. 12). Selain faktor kuantitas pemilih, Makassar juga memiliki karakteristik pemilih yang lebih heterogen, dengan tingkat pendidikan yang relatif lebih tinggi, akses informasi yang lebih luas, serta penetrasi media sosial yang masif, sehingga pola kampanye dan mobilisasi politik di Makassar cenderung lebih variatif dan dinamis dibandingkan daerah-daerah lain di Sulawesi Selatan.

Pada Pilkada Gubernur 2024, ketiga pasangan calon berlomba-lomba membangun jaringan relawan untuk memenangkan suara di Makassar. Pasangan Andi Sudirman Sulaiman – Fatmawati Rusdi membangun basis dukungan melalui Relawan Dozer yang beroperasi di 15 kecamatan di Kota Makassar. Relawan Dozer dikenal memiliki struktur organisasi yang terkoordinasi dengan baik, memanfaatkan platform digital untuk kampanye

massal, sekaligus melakukan pendekatan grassroots melalui pertemuan-pertemuan komunitas di tingkat kelurahan dan RT/RW. Sementara itu, pasangan Fauzi Daud – Tenri Olle Yasin Limpo mengandalkan basis massa partai politik pendukung serta jaringan birokrasi yang kuat mengingat latar belakang Tenri Olle sebagai putra dari Nurdin Abdullah, mantan Gubernur Sulawesi Selatan. Pasangan Edy Manaf – Muflihun memanfaatkan basis dukungan dari organisasi keagamaan dan kelompok profesional muda di perkotaan.

Dalam konteks ini, kemunculan Relawan Dozer yang mendukung pasangan Andi Sudirman Sulaiman – Fatmawati Rusdi menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji, karena mencerminkan dinamika baru dalam partisipasi politik di Makassar, di mana relawan tidak hanya berfungsi sebagai mesin mobilisasi tetapi juga sebagai aktor politik yang memiliki kepentingan dan agency tersendiri.

E. Sejarah Terbentuknya Relawan Dozer

Relawan Dozer merupakan hasil evolusi dari gerakan relawan politik yang telah muncul sebelumnya di Sulawesi Selatan. Akar historisnya dapat ditelusuri pada masa kemenangan Nurdin Abdullah, ketika jaringan pendukung non-partai dikenal dengan nama *Relawan Sulsel Jaya*. Pada periode tersebut, relawan berfungsi sebagai pelengkap tim pemenangan resmi dengan peran utama menjangkau pemilih secara informal dan berbasis kedekatan sosial.

Pengalaman empiris dari fase awal ini memperlihatkan keterbatasan tim pemenangan formal yang bekerja dalam kerangka regulasi ketat Undang-Undang Pemilu dan peraturan KPU. Banyak aturan normatif membatasi fleksibilitas pendekatan langsung ke masyarakat, terutama pada tingkat mikro seperti RT, RW, dan TPS. Kondisi ini mendorong lahirnya kesadaran strategis bahwa pemenangan elektoral membutuhkan instrumen non-partai yang lebih luwes dan adaptif.

Relawan Dozer kemudian dibentuk sebagai respons atas kebutuhan tersebut. Secara konseptual, transformasi ini sejalan dengan literatur tentang relawan non-partai yang menempatkan relawan sebagai aktor politik informal dengan kapasitas mobilisasi berbasis jejaring sosial, bukan struktur kepartaian. Relawan diposisikan bukan sekadar alat kampanye, melainkan sebagai bagian dari komunitas pemilih itu sendiri.

Sub-bab ini akan membahas lima aspek penting terkait Sejarah terbentuknya relawan Dozer; pertama, inisiasi pembentukan relawan Dozer; profil panglima Dozer; ketiga rekam jejak electoral dan kapasitas kepemimpinan Panglima Dozer; keempat, proses penetapan sebagai panglima; kelima, kepemimpinan, pola mobilisasi, dan logika patronase relawan Dozer. Kelima aspek tersebut diuraikan sebagai berikut.

1. Inisiasi Pembentukan Relawan Dozer

Pembentukan Relawan Dozer berlangsung melalui tahapan yang relatif sistematis dan berbasis pengalaman lapangan. Proses ini tidak muncul secara spontan, melainkan merupakan hasil refleksi kolektif atas

praktik pemenangan sebelumnya serta pembacaan terhadap dinamika kompetisi elektoral yang semakin kompleks. Secara kronologis, proses pembentukan Relawan Dozer dapat diringkas ke dalam beberapa fase utama yang saling berkesinambungan.

Pada fase pra-inisiasi, para aktor yang terlibat melakukan evaluasi terhadap pengalaman Relawan Sulsel Jaya pada periode pemenangan sebelumnya. Evaluasi ini terutama menyoroti keterbatasan tim pemenangan formal yang bekerja dalam kerangka regulasi ketat, baik yang diatur oleh Undang-Undang Pemilu maupun peraturan teknis KPU. Dalam fase ini berkembang diskursus internal mengenai kebutuhan akan model relawan yang lebih efisien, fleksibel, dan mampu bergerak cepat di tingkat akar rumput tanpa terbebani oleh prosedur formal yang kaku.

Selanjutnya, fase inisiasi ditandai dengan konsolidasi tokoh-tokoh inisiator yang memiliki pengalaman dalam mobilisasi politik dan pengorganisasian masyarakat. Pada tahap ini dirumuskan konsep Relawan Dozer sebagai relawan non-partai yang berbasis TPS, dengan prinsip utama kedekatan sosial antara relawan dan pemilih. Salah satu keputusan strategis yang ditegaskan sejak awal adalah penetapan prinsip kerja tanpa politik uang, sebagai upaya membangun legitimasi moral dan kepercayaan publik terhadap gerakan relawan.

Memasuki fase pembentukan struktur, dilakukan penunjukan Panglima atau Pimpinan Dozer sebagai figur sentral yang mengoordinasikan seluruh jaringan relawan. Struktur komando dibangun secara sederhana namun tegas, memungkinkan alur koordinasi berjalan

efektif tanpa birokrasi berlapis. Pada fase ini pula relawan mulai disebarakan secara terstruktur dari tingkat kecamatan hingga TPS, dengan penekanan pada basis wilayah pemilih.

Tahap akhir adalah fase mobilisasi dan operasionalisasi, di mana Relawan Dozer mulai menjalankan fungsi pemenangan secara aktif. Rekrutmen relawan TPS dilakukan dengan memilih individu yang merupakan pemilih di TPS tersebut, dikenal oleh masyarakat setempat, dan memiliki ketokohan lokal. Aktivitas mobilisasi mengandalkan kombinasi media sosial dan komunikasi interpersonal, sementara dukungan operasional diberikan dalam bentuk insentif internal yang terbatas, seperti bantuan kuota komunikasi dan transportasi, tanpa menyasar pemilih secara langsung.

Relawan Dozer merupakan hasil dari perencanaan strategis yang matang, berangkat dari pembelajaran elektoral sebelumnya serta respons terhadap konteks kompetisi politik yang semakin ketat. Dengan demikian, Relawan Dozer dapat dipahami sebagai bentuk institusionalisasi relawan non-partai yang dirancang secara sadar untuk meningkatkan efektivitas mobilisasi politik di tingkat lokal.

2. Profil Panglima Dozer: Rully Rozano Zarwan

Rully Rozano Zarwan Rully Rozano Zarwan merupakan sosok sentral di balik berdiri dan berkembangnya Relawan Dozer. Lahir dan besar di Sulawesi Selatan, Rully Rozano memiliki latar belakang yang unik: seorang akademisi sekaligus aktivis politik yang menggabungkan

pemahaman teoritis tentang mobilisasi massa dengan pengalaman praktis di lapangan elektoral. Latar belakang akademisnya di bidang ilmu sosial dan politik memberinya kerangka analitis yang kuat dalam membaca peta kekuatan, mengidentifikasi celah strategis, dan merancang pendekatan mobilisasi yang berbasis data. Di sisi lain, keterlibatannya yang panjang dalam berbagai kontestasi elektoral di Sulawesi Selatan membekalinya dengan pemahaman yang sangat mendalam tentang dinamika sosial, relasi patronase, dan karakter pemilih di berbagai wilayah.

Secara genealogi politik, Rully Rozano bukan figur baru dalam ekosistem politik Sulawesi Selatan. Ia telah lama membangun jaringan sosial dan politik yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat, mulai dari tokoh-tokoh komunitas di tingkat kelurahan, aktivis organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan, hingga figur-figur berpengaruh di tingkat kabupaten dan kota. Jaringan ini tidak dibangun secara instan melalui kalkulasi transaksional semata, melainkan tumbuh secara organik melalui keterlibatan langsung dalam berbagai isu sosial dan politik yang menyentuh kehidupan masyarakat. Fondasi jaringan inilah yang kemudian menjadi tulang punggung Relawan Dozer dalam melakukan rekrutmen berjenjang dan mobilisasi masif.

3. Rekam Jejak Elektoral dan Kapasitas Kepemimpinan

Rekam jejak elektoral Rully Rozano Zarwan menjadi salah satu argumen terkuat yang melegitimasi posisinya sebagai Panglima Dozer. Pengalaman pertamanya dalam mobilisasi skala besar dimulai pada

Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2018, ketika ia terlibat aktif dalam kemenangan pasangan Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman. Keterlibatan ini memberikan dua hal sekaligus: pertama, pemahaman langsung tentang mekanisme kerja kampanye gubernur yang melibatkan 24 kabupaten dan kota; kedua, relasi personal yang kuat dengan Andi Sudirman Sulaiman sebagai calon wakil gubernur yang kemudian menjadi calon gubernur pada Pilkada 2024.

Pencapaian yang paling menentukan posisinya datang dari Pemilihan Presiden 2024. Rully Rozano berhasil mengoordinasikan jaringan relawan untuk memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Sulawesi Selatan dengan perolehan sekitar 3 juta suara. Keberhasilan ini bukan sekadar angka statistik, melainkan bukti kemampuan manajerial yang konkret: kemampuan mengelola jaringan relawan yang tersebar di 24 kabupaten/kota, mengkoordinasikan ribuan aktor lapangan dalam satu komando terpadu, mengelola aliran informasi secara real-time, serta menjaga konsistensi pesan dan strategi di tengah dinamika kampanye yang bergerak cepat. Rekam jejak ini membangun reputasi Rozano sebagai figur yang terbukti mampu mengonversi jaringan sosial menjadi kekuatan elektoral yang terukur, dan menjadi fondasi utama bagi legitimasi kepemimpinannya di dalam Relawan Dozer pada Pilkada Sulawesi Selatan 2024.

Kapasitas kepemimpinan Rully Rozano tidak hanya ditunjukkan melalui angka kemenangan, tetapi juga melalui cara ia membangun dan mempertahankan kohesi organisasi. Ia dikenal sebagai pemimpin yang

menerapkan gaya kepemimpinan situasional: tegas dan direktif dalam penetapan target dan standar kerja, namun fleksibel dan suportif dalam merespons kendala yang dihadapi koordinator di lapangan. Pendekatan ini menciptakan iklim organisasi yang disiplin namun tidak kaku, di mana relawan merasa dihargai sebagai mitra strategis, bukan sekadar instrumen mobilisasi. Kombinasi antara ketegasan dalam penerapan standar dan keterbukaan dalam pemecahan masalah bersama mencerminkan prinsip kepemimpinan adaptif yang memungkinkan organisasi bergerak secara efisien di bawah tekanan elektoral tanpa kehilangan solidaritas internal.

4. Proses Penetapan sebagai Panglima Dozer

Penetapan Rully Rozano Zarwan sebagai Panglima Dozer tidak melalui proses formal seperti pemilihan atau seleksi terbuka. Sebaliknya, penetapan ini berlangsung melalui proses konsolidasi dan konsensus di antara para aktor kunci yang terlibat dalam inisiasi pembentukan relawan. Proses ini mencerminkan logika kepemimpinan politik informal yang berlaku dalam konteks relawan non-partai, di mana legitimasi kepemimpinan dibangun atas dasar rekognisi sosial dan kepercayaan kolektif, bukan atas dasar mandat institusional.

Dalam fase pra-pembentukan Relawan Dozer, sejumlah tokoh yang memiliki pengalaman dalam mobilisasi politik di Sulawesi Selatan melakukan serangkaian pertemuan konsolidasi untuk mendiskusikan strategi pemenangan Andi Sudirman Sulaiman – Fatmawati Rusdi. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, nama Rully Rozano selalu muncul sebagai

figur yang paling tepat untuk memimpin gerakan relawan, mengingat kombinasi unik antara pengalaman elektoral yang terbukti, jaringan sosial yang luas, dan kapasitas manajerial yang teruji. Koordinator Kecamatan Manggala menjadi salah satu saksi dari proses konsolidasi tersebut, dan menyatakan bahwa sejak awal terdapat konsensus di antara para aktor inisiator bahwa Rully Rozano adalah figur yang paling tepat untuk memimpin gerakan relawan, mengingat kombinasi antara pengalaman elektoral yang terbukti, jaringan sosial yang luas, dan kapasitas personal yang dapat dipercaya.

Kriteria yang menjadi dasar konsensus penetapan Panglima mencakup empat dimensi utama. Pertama, rekam jejak elektoral yang terbukti efektif, setidaknya dalam dua kontestasi besar. Kedua, kedalaman dan keluasan jaringan sosial yang menjangkau berbagai level struktur masyarakat di Sulawesi Selatan. Ketiga, kemampuan manajerial dalam mengoordinasikan organisasi besar yang tersebar secara geografis. Keempat, integritas personal yang menjamin bahwa kepemimpinan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi yang merugikan organisasi. Keempat kriteria ini secara implisit terpenuhi oleh Rully Rozano, sehingga penetapannya sebagai Panglima berlangsung tanpa kontestasi berarti di antara para aktor inisiator.

Setelah penetapan konsensual tersebut, Rully Rozano secara resmi mendeklarasikan pembentukan Relawan Dozer dan mengumumkan visi serta misi gerakan relawan ini kepada publik. Ia menetapkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi organisasi: kerja berbasis data, mobilisasi

tanpa politik uang, struktur berjenjang yang akuntabel, dan loyalitas tunggal kepada pasangan calon yang didukung. Prinsip-prinsip ini bukan sekadar jargon, melainkan dioperasionalkan melalui sistem kerja yang terstruktur dan mekanisme kontrol yang konsisten, sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan mengenai rekrutmen dan struktur organisasi pada bab selanjutnya.

Secara teoretis, proses penetapan Panglima Dozer mencerminkan mekanisme seleksi kepemimpinan dalam organisasi politik informal yang berbasis kepercayaan dan rekognisi sosial, sebagaimana dijelaskan oleh Burns (1978) dalam teori kepemimpinan transformasional. Pemimpin transformasional tidak dipilih semata-mata karena jabatan atau kewenangan formal, melainkan karena kemampuannya menginspirasi, memotivasi, dan mengoordinasikan aktor-aktor lain untuk bergerak menuju tujuan kolektif. Dalam konteks relawan Dozer, penetapan Rully Rozano sebagai Panglima merupakan produk dari rekognisi kolektif bahwa ia adalah figur yang paling mampu memimpin transformasi gerakan relawan dari kelompok dukungan informal menjadi organisasi mobilisasi yang terstruktur dan efektif secara elektoral.

5. Kepemimpinan, Pola Mobilisasi, dan Logika Patronase Relawan Dozer

Kepemimpinan Relawan Dozer berada di bawah figur Panglima atau Pimpinan Dozer yang memiliki pengalaman politik sebelumnya dalam pengorganisasian massa dan kemenangan elektoral. Modal utama

kepemimpinan ini tidak terletak pada otoritas formal, melainkan pada jaringan sosial, reputasi personal, serta kemampuan membangun loyalitas relawan lintas wilayah.

Dalam merekrut relawan khususnya relawan TPS, Relawan Dozer menerapkan kriteria yang menekankan kedekatan sosial dengan pemilih. Relawan dipilih dari pemilih di TPS yang sama, dikenal oleh masyarakat, dan memiliki ketokohan lokal. Pola ini menunjukkan bekerjanya logika patronase, di mana pengaruh tokoh informal masih menjadi rujukan utama dalam pengambilan keputusan politik masyarakat.

Namun, berbeda dengan patronase berbasis material, Relawan Dozer mengandalkan patronase simbolik dan sosial, yakni kepercayaan, kedekatan emosional, dan legitimasi sosial. Pendekatan ini memungkinkan mobilisasi dukungan tanpa praktik politik uang. Selama masa kampanye, Relawan Dozer tidak pernah dilaporkan ke Bawaslu terkait pelanggaran politik uang, karena tidak terdapat pemberian materi kepada pemilih. Insentif yang diberikan bersifat internal dan operasional, ditujukan untuk mendukung kerja relawan, bukan memengaruhi pilihan politik masyarakat.

Dari perspektif teori mobilisasi politik, Relawan Dozer merepresentasikan model mobilisasi berbasis jejaring sosial (network-based mobilization), di mana relawan bertindak sebagai simpul (nodes) yang menyebarkan pesan politik melalui relasi personal. Model ini memperkuat temuan bahwa relawan non-partai memiliki keunggulan dalam membangun kepercayaan pemilih dibandingkan aktor partai yang sering dipersepsikan pragmatis.

Terkait patronase, mobilisasi politik, dan peran relawan non-partai dalam kontestasi elektoral lokal. Relawan Dozer menunjukkan bahwa praktik politik di tingkat lokal tidak sepenuhnya dapat dijelaskan melalui pendekatan kelembagaan formal semata, melainkan membutuhkan pembacaan terhadap dinamika sosial dan jaringan informal yang bekerja di luar struktur kepartaian.

Pertama, dari perspektif teori patronase, Relawan Dozer memperlihatkan bahwa patronase tidak selalu beroperasi dalam bentuk pertukaran material langsung. Bekerjanya patronase sosial dan simbolik, di mana pengaruh tokoh lokal, relasi kekerabatan, serta kepercayaan personal menjadi mekanisme utama dalam memengaruhi preferensi politik pemilih. Patronase di konteks lokal Makassar bersifat adaptif dan tidak selalu identik dengan praktik politik uang.

Kedua, dalam kerangka teori mobilisasi politik, Relawan Dozer merepresentasikan model mobilisasi berbasis jejaring sosial (*network-based mobilization*). Relawan yang direkrut dari pemilih di TPS yang sama berfungsi sebagai simpul-simpul mobilisasi yang efektif karena memiliki kedekatan struktural dan emosional dengan pemilih. Mobilisasi politik yang berbasis relasi interpersonal cenderung lebih persuasif dibandingkan mobilisasi yang digerakkan oleh aktor formal seperti partai politik.

Ketiga, keberadaan Relawan Dozer menguatkan diskursus tentang relawan non-partai sebagai aktor politik informal yang memiliki otonomi relatif dari struktur kepartaian dan tim pemenangan resmi. Relawan non-partai mampu mengisi ruang-ruang yang tidak terjangkau oleh tim formal

akibat keterbatasan regulatif. Dengan demikian, Relawan Dozer dapat dipahami sebagai bentuk institusionalisasi informal dari partisipasi politik warga, yang bekerja berdampingan namun tidak sepenuhnya berada di bawah logika kelembagaan formal.

Efektivitas pemenangan elektoral di tingkat lokal tidak hanya ditentukan oleh desain institusional formal, tetapi juga oleh kemampuan aktor politik memanfaatkan jaringan sosial, patronase simbolik, dan relawan non-partai sebagai instrumen mobilisasi. Penautan ini sekaligus menjadi landasan analitis untuk pembahasan lebih lanjut mengenai implikasi temuan Relawan Dozer terhadap teori dan praktik demokrasi elektoral di tingkat lokal pada bab berikutnya.